

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) Provinsi Sumatera Selatan



INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) Provinsi Sumatera Selatan



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021**

ISSN : -

Katalog : 3102033.16

Nomor Publikasi : 16000.2249

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xvi + 87 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dicetak oleh : CV. Rabbani

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si

Penanggung Jawab :

Tri Ratna Dewi, S.Si, MM

Editor :

Eko Tris Darmanto SST, M.Si

Analisis :

Lia Nurliana, S.Si, M.Si

Etty Meila Nurty SST, M.Si

Lismiana SE., M.Si

Desi Eryani SST, M.Si

Aditya Gusti Mangestika SST

Nita Tri Andini, S.ST

Kompilasi Data:

Lia Nurliana, S.Si, M.Si

Etty Meila Nurty SST, M.Si

Lismiana SE., M.Si

Desi Eryani SST, M.Si

Aditya Gusti Mangestika SST

Nita Tri Andini, S.ST

Layout :

Arie Almiyati, SE, MM

KATA PENGANTAR

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati dan diimplementasikan dalam empat tahun terakhir oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Data dan informasi tentang capaian implementasi TPB/SDGs dalam pembangunan nasional mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka memonitor capaian dan target serta evaluasi program pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pemerintah penyedia data berkualitas, BPS Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs di Sumatera Selatan dalam bentuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Publikasi “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2021” ini merupakan bentuk komitmen BPS Sumsel dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Indikator yang disajikan tidak hanya berasal dari BPS saja tetapi juga berasal dari kementerian atau lembaga lain dan Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan salah satu prinsip TPB/SDGs yaitu inklusif, yang diartikan keterlibatan semua *stakeholder*.

Data dan Informasi yang disajikan dalam publikasi ini telah mencakup seluruh tujuan yang ada pada indikator TPB/SDGs. Akan tetapi mengingat keterbatasan ketersediaan data, tidak semua indikator dapat disajikan dalam publikasi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Palembang, Desember 2022
Kepala Badan Statistik
Provinsi Sumatera Selatan

Zulkipli

DAFTAR TABEL



Halaman

Tabel 10.1	Rumah Tangga Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2019-2020	67
Tabel 10.2	Penduduk 5 Tahun ke Atas Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2020-2021	68

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 1.1	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2021	3
Gambar 1.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021	4
Gambar 1.3	Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021	5
Gambar 1.4	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021	5
Gambar 1.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021	6
Gambar 1.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021	7
Gambar 1.7	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021	7
Gambar 1.8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021	8
Gambar 1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021	8
Gambar 1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021	9
Gambar 1.11	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021	9

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (tahun), 2016-2021	27
Gambar 4.7	Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2016-2021	28
Gambar 4.8	Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2016-2021	28
Gambar 4.9	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SD/MI/Sederajat, 2016-2021	29
Gambar 4.10	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMP/MTS/Sederajat, 2016-2021	30
Gambar 4.11	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat, 2016-2021	30
Gambar 4.12	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, 2016-2021	31
Gambar 4.13	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun (persen), 2016-2021	32
Gambar 4.14	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Kabupaten/Kota (persen), 2021	32
Gambar 4.15	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun (persen), 2016-2021	33
Gambar 4.16	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-59 Tahun (persen), 2016-2021	33
Gambar 5.1	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18	37

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 11.1	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (persen), 2017-2021	71
Gambar 16.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2016-2020	75
Gambar 16.2	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2016-2020	76
Gambar 16.3	Indeks Kebebasan Sipil, 2016-2020	77
Gambar 16.4	Indeks Hak-Hak Politik, 2016-2020	77
Gambar 16.5	Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020	78
Gambar 16.6	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah dan yang Memiliki Akta Kelahiran, 2016-2020	78
Gambar 16.7	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah dan yang Memiliki Akta Kelahiran, 2016-2020	79
Gambar 17.1	Proporsi Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet, 2016-2020	83
Gambar 17.2	Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik, 2017-2020	84
Gambar 17.3	Persentase Konsumen yang Menggunakan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai Rujukan, 2017-2020	85
Gambar 17.4	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik, 2017-2020	86
Gambar 17.5	Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional,	87



TUJUAN 1



**Mengakhiri Kemiskinan
dalam Segala Bentuk dimanapun**



TUJUAN 1

Tanpa Kemiskinan



Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dan isu global. Dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun pada tahun 2030. Target-target yang akan dicapai selama 15 tahun ke depan akan diulas lebih lanjut pada penjelasan berikut :

TARGET 1.2 **PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN, DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI**

INDIKATOR 1.2.1 **PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Gambar 1.1
Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Hasil Susenas menunjukkan terjadi penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan secara terus menerus mulai tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tercatat sebesar 13,19 persen kemudian terus menurun setiap tahunnya hingga menjadi 12,66 persen di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 angka kemiskinan meningkat menjadi 12,84 persen. Dalam target RAD (Rencana Aksi Daerah) Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2021 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ditargetkan berkisar antara 9,90-10,78 persen. Sehingga, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bersinergi untuk menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan agar tercapai target “zero poverty”.



TARGET 1.2

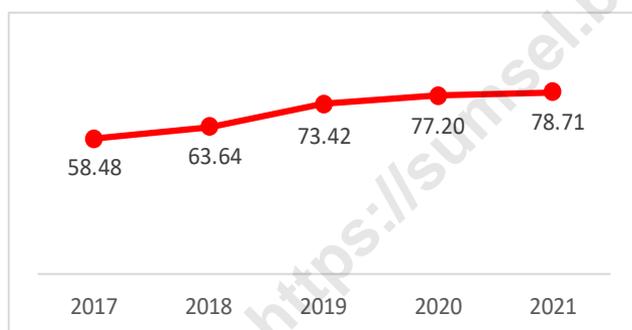
PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN, MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, WARISAN, SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI BARU, DAN JASA KEUANGAN YANG TEPAT, TERMASUK KEUANGAN MIKRO

INDIKATOR 1.2.1

PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN

Gambar 1.2

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021



Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

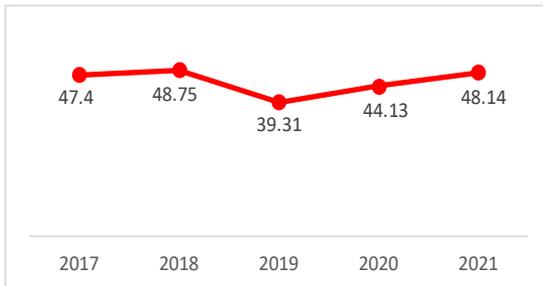
Indikator persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan difokuskan pada penduduk 40% pendapatan terendah (kuintil 1 dan kuintil 2). Pada gambar di atas terlihat bahwa persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar 58,48 persen. Persentasenya kemudian terus meningkat hingga mencapai 78,71 persen di tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan ada perubahan ke arah yang lebih baik, sebagai contoh persentase yang lebih tinggi pada tahun 2021 menggambarkan risiko kematian ibu melahirkan yang lebih rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



INDIKATOR 1.4.1.(B) PERSENTASE ANAK UMUR 12-23 BULAN YANG MENERIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.3

Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021



Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap pada tahun 2020 masih di bawah target RAD

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

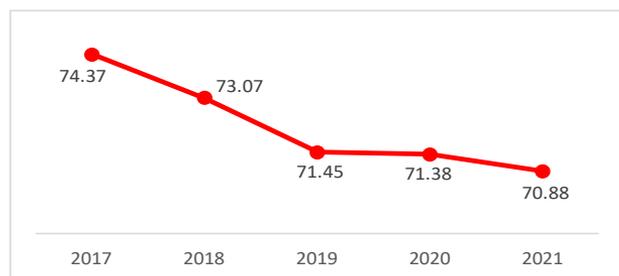
Berdasarkan hasil Susenas, persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di Sumatera Selatan cukup berfluktuatif, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, kemudian menurun di tahun 2019, dan akhirnya kembali meningkat di tahun 2020 (44,13 persen) dan 2021 (48,14 persen). Persentase di tahun 2021 tersebut masih berada di bawah target RAD Provinsi Sumatera Selatan dimana persentase yang ditargetkan pada tahun 2021 adalah 52,80 persen. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari masyarakat, dan pemerintah agar target RAD tersebut dapat tercapai.

INDIKATOR 1.4.1.(C) PREVALENSI PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI (CPR) SEMUA CARA PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) USIA 15-49 TAHUN YANG BER STATUS KAWIN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.4

Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021

Pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (15-49 tahun) mengalami penurunan



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional



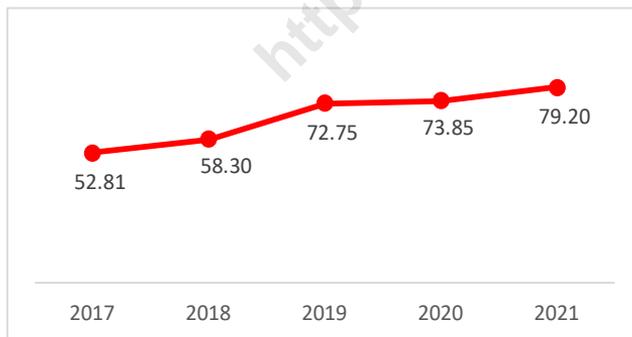
Pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (15-49 tahun) mengalami penurunan dari sebesar 71,38 persen di tahun 2020 menjadi 70,88 persen di tahun 2021. Hal ini mengakibatkan target RAD angka pemakaian kontrasepsi pada PUS menurut dokumen RAN yang sebesar 73,82 masih belum bisa tercapai di tahun ini.

INDIKATOR 1.4.1.(D) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Akses rumah tangga (40 persen pendapatan terendah) terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan di Sumatera Selatan meningkat pada tahun 2021 (79,20 persen). Jika dibandingkan dengan target RAD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 (ditargetkan sebesar 60,87 persen), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan telah melampaui target.

Gambar 1.5

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021



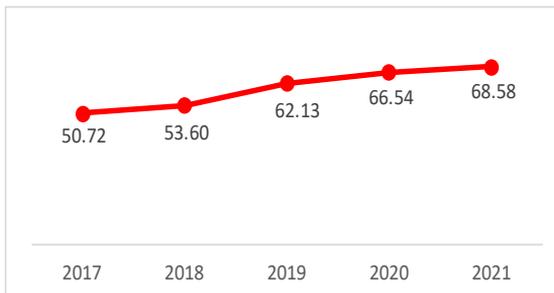
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2021 meningkat

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional



INDIKATOR 1.4.1.(E) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN ANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.6
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021



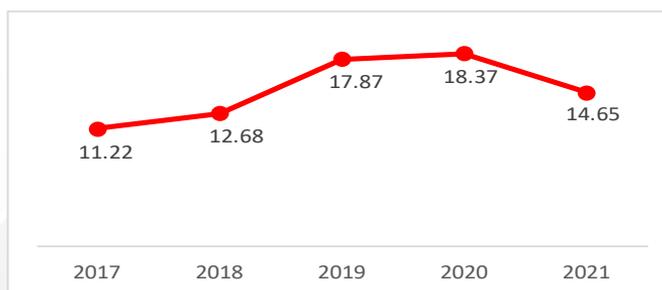
Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan mengalami peningkatan

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan hasil Susenas, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Sumatera Selatan di tahun 2017 sebesar 50,72 persen dan terus meningkat setiap tahunnya, hingga mencapai 68,58 persen di tahun 2021. Berdasarkan target RAD, pada tahun 2021 diharapkan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada penduduk 40% pendapatan terendah mencapai 62,14 persen sehingga akses sanitasi layak dan berkelanjutan sudah terpenuhi.

INDIKATOR 1.4.1.(F) PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH PERKOTAAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.7
Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional



TUJUAN 1

Tanpa Kemiskinan

INDIKATOR 1.4.1.(G) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI/SEDERAJAT (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.8

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021

Pada tahun 2021, angka APM SD/MI/Sederajat sudah mencapai 98,29 persen



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jika APM=100, maka dapat dikatakan bahwa seluruh anak sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Nilai APM SD/MI/Sederajat di Sumatera Selatan sudah cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun di tahun 2021 ini mengalami penurunan menjadi 98,29 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah yang bersekolah di SD/MI/Sederajat dapat tepat waktu..

INDIKATOR 1.4.1.(H) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTS/SEDERAJAT (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

APM SMP/MTs/Sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar 79,43 persen, kemudian turun menjadi 75,40 persen di tahun 2018. Nilai APMnya kembali naik sejak tahun 2019 sebesar 75,91 persen hingga tahun 2021 sebesar 80,98 persen. Dengan capaian APM SMP/MTs/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah) Provinsi Sumatera Selatan tersebut, maka diperlukan usaha yang lebih keras lagi dari segenap stakeholder pendidikan dalam upaya meningkatkan nilai APM SMP/MTs/Sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah).

Gambar 1.9

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021



APM SMP/MTs/Sederajat penduduk 40% pendapatan terendah) pada tahun 2021, mencapai 80,98 persen

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional



TUJUAN 1

Tanpa Kemiskinan

INDIKATOR 1.4.1.(I) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/MA/SEDERAJAT (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

APM SMA/MA/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah) pada tahun 2021 di Sumatera Selatan sebesar 57,95. Nilai APM SMA/MA/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah) lebih rendah dibandingkan dengan APM SMP/MTs/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang sekolah, maka semakin kecil anak usia sekolah terkait yang dapat bersekolah tepat waktu.

Gambar 1.10

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021

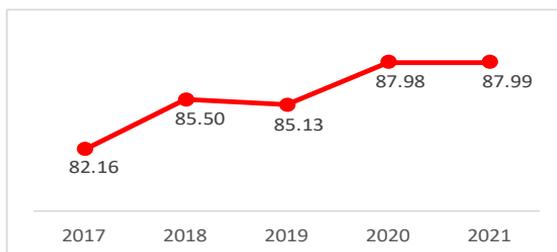


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

INDIKATOR 1.4.1.(J) PERSENTASE PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.11

Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kepemilikan akta kelahiran akan mempermudah seseorang untuk dapat mengakses berbagai layanan seperti layanan akses kesehatan, akses pendidikan, jaminan sosial dan pelayanan masyarakat lainnya seperti pembuatan SIM, paspor, pengurusan hak waris dan lainnya. Persentase anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran tahun 2021 tercatat 87,99 persen. Jika dibandingkan dengan target RAD pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 85,22 persen, ini berarti target tersebut sudah tercapai.

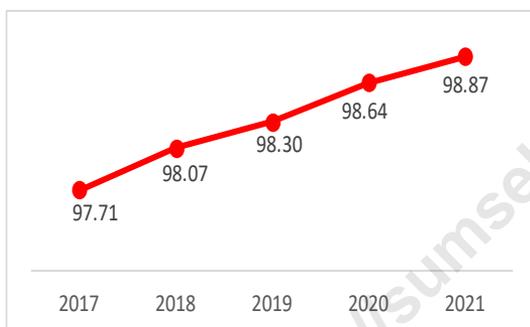


INDIKATOR 1.4.1.(K) PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN YANG SUMBER PENERANGAN UTAMANYA LISTRIK BAIK DARI PLN DAN BUKAN PLN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Kebutuhan akan listrik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Oleh karena itu pemerintah harus dapat menjamin seluruh masyarakat dapat menikmati listrik tidak terkecuali bagi masyarakat miskin dan rentan.

Gambar 1.12

Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik, Baik dari PLN dan Bukan PLN (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2017-2021



Pada tahun 2020, masih ada 1,36 persen rumah tangga belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

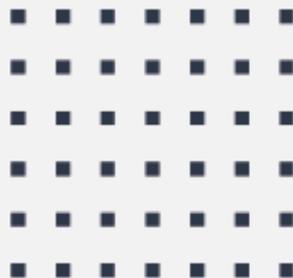
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar 98,87 persen. Ini berarti masih ada 1,13 persen rumah tangga miskin dan rentan yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama. Padahal RAD menargetkan pada tahun 2021 persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN mencapai 100,00 persen.



TUJUAN 2

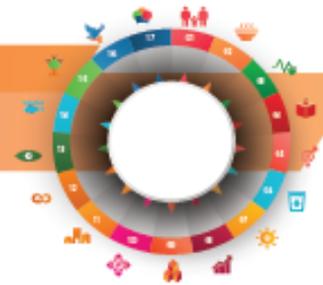


**Menghilangkan Kelaparan,
Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,
serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**



TUJUAN 1

Tanpa Kelaparan



Asupan kalori minimum yang dianjurkan untuk setiap penduduk yaitu 1400 kkal/kapita/hari yang disesuaikan dengan tingkat usia. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu sejak tahun 2017-2021, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di Sumatera Selatan cukup berfluktuatif. Persentase tertinggi dicapai pada tahun 2019 (6,97 persen) dan terendah pada tahun 2017 (4,51 persen).

TARGET 1.2 **PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN KELAPARAN DAN MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA ORANG, KHUSUSNYA ORANG MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, TERMASUK BAYI, TERHADAP MAKANAN YANG AMAN, BERGIZI DAN CUKUP SEPANJANG TAHUN**

INDIKATOR 2.1.2.(A) **PROPORSI PENDUDUK DENGAN ASUPAN KALORI MINIMUM DI BAWAH 1400 KKal / KAPITA/HARI**

Gambar 2.1

Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 KKal/Kapita/Hari (persen), 2017-2021



Proporsi penduduk dengan asupan minimum 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2016-2020 masih di atas target RAD yang sebesar 4,21 persen.

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum pada tahun 2017 sebesar 4,51 persen, kemudian naik cukup signifikan di tahun 2018 dan 2019 menjadi 6,81 persen dan 6,97 persen. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2020 (6,75 persen) dan tahun 2021 (5,18 persen). Target RAD 2021 untuk indikator ini yaitu sebesar 4,11 persen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa proporsi penduduk dengan asupan minimum 1400 kkal/kapita/hari pada periode 5 tahun tersebut masih di atas target. Namun demikian, masih perlu upaya yang keras untuk meningkatkan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di Sumatera Selatan.



INDIKATOR 2.2.2.(B) PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Sumatera Selatan pada periode waktu tahun 2017 hingga 2021 cukup fluktuatif. Di tahun 2017 sebesar 58,35 persen lalu turun cukup signifikan di tahun 2018 menjadi 41,56 persen, kemudian semakin meningkat dari tahun 2019, 2020 sampai 2021, masing-masing sebesar 64,39 persen, 68,06 persen dan 69,12 persen. Jika dibandingkan dengan RAN 2021 sebesar 66,00 persen, maka target persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di tahun 2021 telah melampaui target.

Gambar 2.2
Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif,
2017-2021



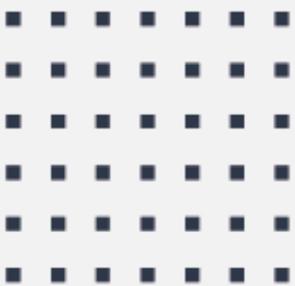
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Kementerian Kesehatan, Riskesdas 2018



TUJUAN 3

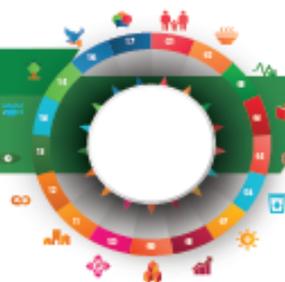


Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia



TUJUAN 3

Kehidupan Sehat dan Sejahtera



Bonus demografi yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020 hingga 2030 mempunyai tantangan yang cukup besar di bidang kesehatan. Kondisi struktur penduduk pada saat itu lebih banyak didominasi oleh penduduk usia produktif. Disamping penambahan penduduk usia produktif, kondisi di masyarakat juga diwarnai dengan penambahan penduduk usia lanjut yang menjadi permasalahan tersendiri. Angka harapan hidup di Sumatera Selatan memang mengalami peningkatan. Tetapi, ancaman penyakit tidak menular yang prevalensinya mengalami peningkatan tidak bisa dianggap remeh.

TARGET 3.1

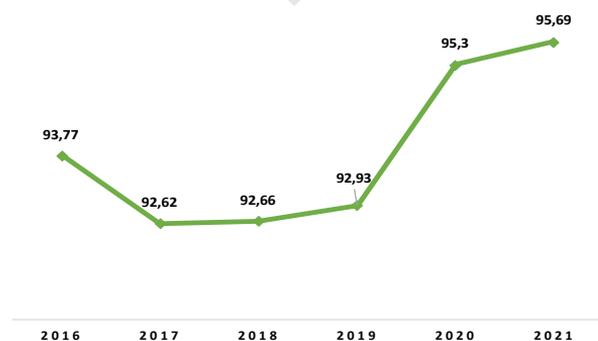
PADA TAHUN 2030, MENGURANGI RASIO ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA KURANG DARI 70 PER 100.000 KELAHIRAN

INDIKATOR 3.1.2*

PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH

Gambar 3.1

Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Persentase kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 dengan persentase sebesar 95,69 persen.

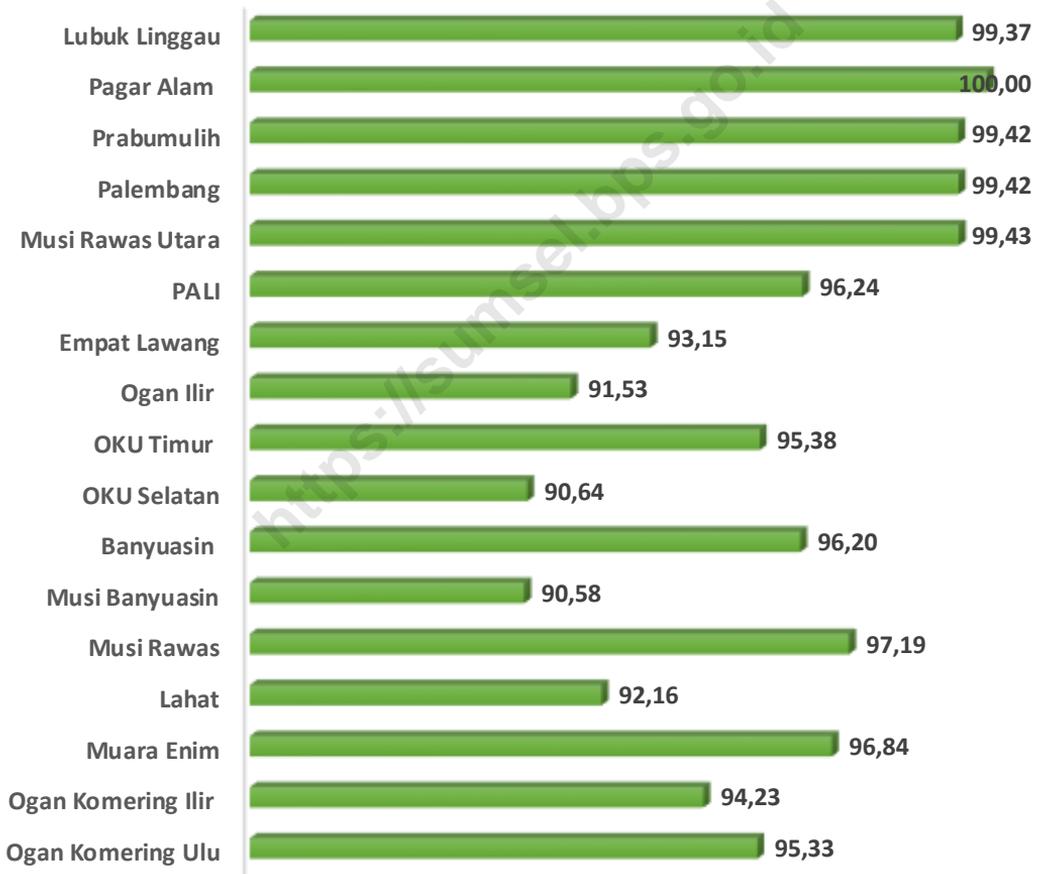
Dalam rentang waktu tahun 2016-2020, proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sudah berada di angka lebih dari 90 persen.



Capaian nilai indikator ini sudah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai di atas 90 persen, Bahkan di Kota Pagar Alam capaian indikator ini di tahun 2021 telah mencapai 100 persen.

Gambar 3.2

Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



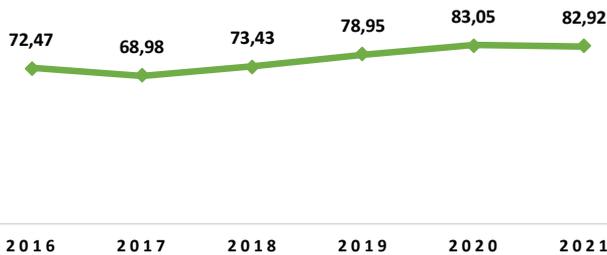
TUJUAN 3

Kehidupan Sehat dan Sejahtera

INDIKATOR 3.1.2(A)* PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN

Gambar 3.3

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan, 2016-2021



Persentase perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan tahun 2021 mengalami penurunan

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

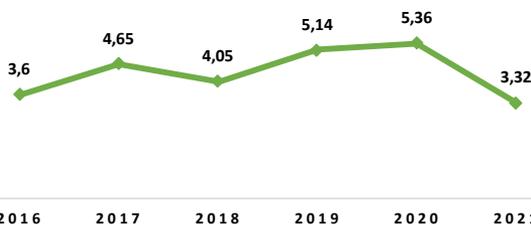
Rentang waktu antara tahun 2017 sampai 2020, persentase perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen dari tahun 2020. Tahun 2021 nilai persentasenya sebesar 82,92, artinya pemenuhan fasilitas kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun begitu prestasi ini masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.

TARGET 3.8 MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL, TERMASUK PERLINDUNGAN RISIKO KEUANGAN, AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BAIK, DAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN DAN VAKSIN DASAR YANG AMAN, EFEKTIF, BERKUALITAS, DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA ORANG

INDIKATOR 3.8.1 (A) UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN

Gambar 3.4

Unmet Need Pelayanan Kesehatan, 2016-2021



Angka unmet need kesehatan tahun 2021 adalah 3,32

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



x



TUJUAN 4



Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua



TUJUAN 4

Pendidikan Berkualitas



Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan. Menurut Presiden Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan pentingnya sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan karakter bagi anak bangsa. SDM dapat memajukan suatu negara asalkan SDM tersebut harus memiliki pengetahuan dan teknologi serta kreativitas dan inovasi. Selain itu, pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai, dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa (Kemdikbud, 2018).

TARGET 4.1 **PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF**

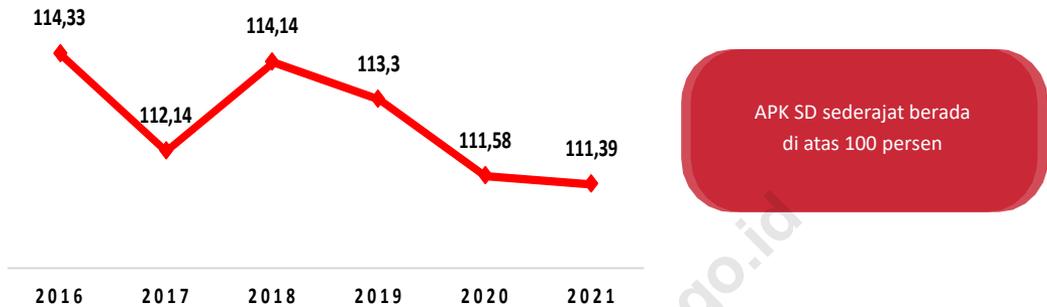
INDIKATOR 4.1.1.(D) **ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat di Sumatera Selatan nilainya berada di atas angka 100 persen, Nilai APK SD di Sumatera Selatan yang berada di atas angka 100 persen menunjukkan bahwa populasi murid SD sederajat di Sumatera Selatan mencakup anak di luar batas usia sekolah SD sederajat. Beberapa penyebab yang mungkin terjadi antara lain pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah atau bisa juga disebabkan pengulangan kelas. Selain itu nilai APK SD sederajat yang nilainya di atas 100 persen juga menunjukkan bahwa Sumatera Selatan mampu menampung penduduk usia sekolah SD sederajat lebih dari target yang sesungguhnya.

APK SD sederajat di Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2016 hingga 2021 nilainya selalu di atas 100. Sempat mengalami penurunan nilai dari 114,33 tahun 2016 menjadi 112,14 di tahun 2017, namun APK SD sederajat kembali naik menjadi 114,14 di tahun 2018. Nilai APK SD sederajat di Provinsi Sumatera Selatan kembali turun di tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2021 nilai APK SD sederajat Sumsel sebesar 111,39 persen



Gambar 4.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (persen), 2016-2021

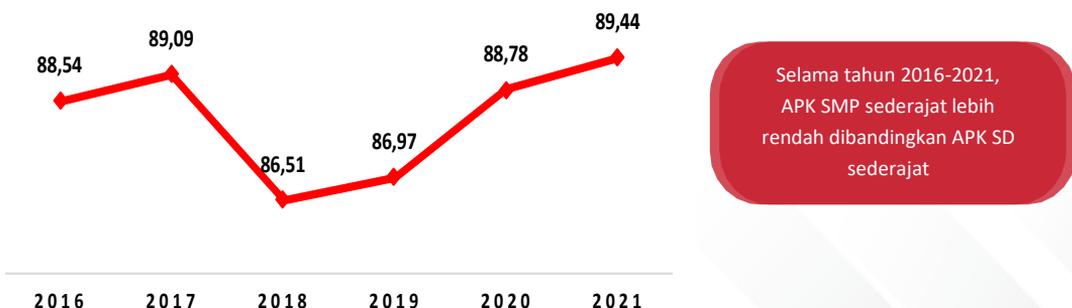


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

INDIKATOR 4.1.1.(E) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/SEDERAJAT

Angka Selama tahun 2016-2021, APK SMP sederajat di Sumatera Selatan lebih rendah dibandingkan APK SD sederajat. Artinya, partisipasi penduduk untuk melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP sederajat lebih rendah dibandingkan pada jenjang pendidikan SD. APK SMP/MTs/sederajat di Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 89,44 persen lebih tinggi dari tahun 2020 yang nilainya 88,78 persen.

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat (persen), 2016-2021



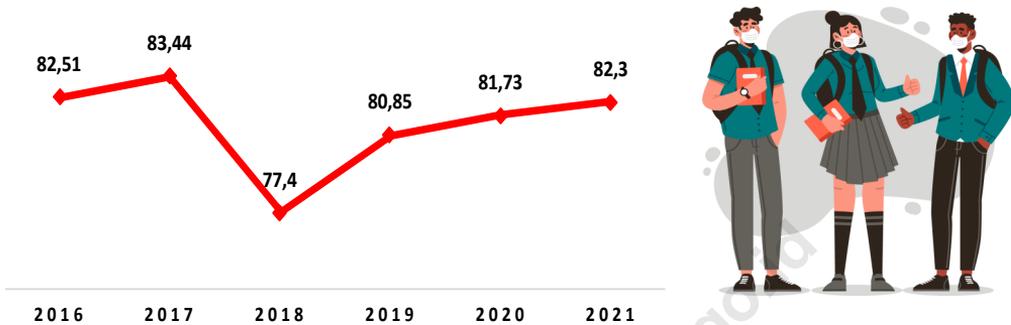
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



INDIKATOR 4.1.1.(F) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT

Gambar 4.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat (persen), 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

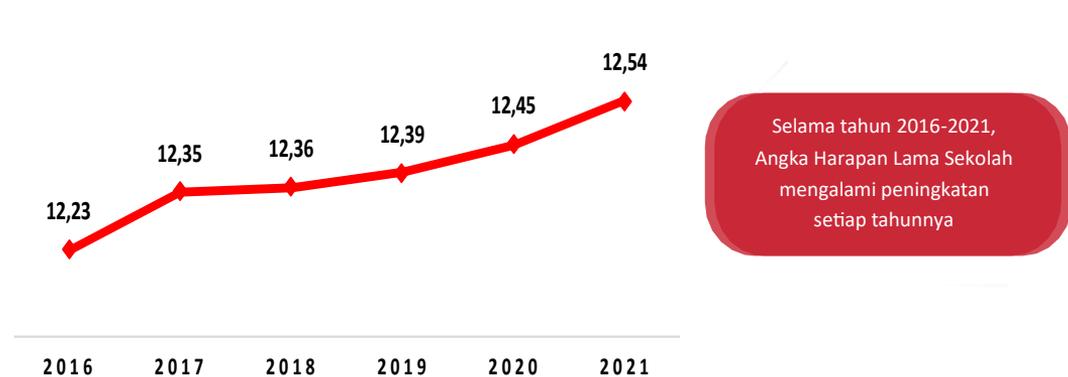
Nilai APK SMA/SMK/MA/ sederajat di Sumatera Selatan lebih rendah jika dibandingkan nilai APK SMP sederajat dan SD sederajat. Ini bisa berarti semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin berkurang partisipasi masyarakat bersekolah pada jenjang tersebut.

Berbeda dengan APK SD sederajat Sumatera Selatan yang mengalami penurunan di tahun 2021, APK SMA sederajat di tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Peningkatan APK SMA sederajat ini sejalan dengan APK SMP sederajat yang juga mengalami peningkatan di tahun 2021.

INDIKATOR 4.1.1.(H) ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

Gambar 4.4

Angka Harapan Lama Sekolah (tahun), 2016-2021

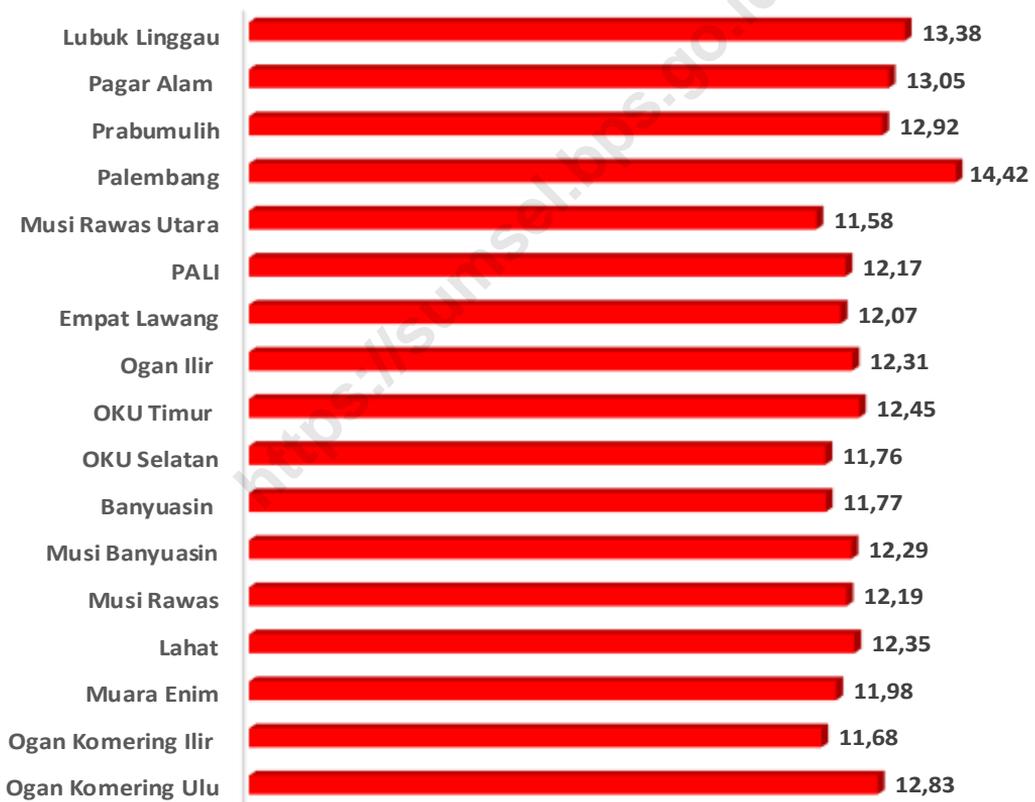


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



Angka harapan lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada gambar 4.5 dimana diketahui bahwa Kota Palembang memiliki nilai tertinggi angka harapan lama sekolah sebesar 14,42 tahun atau setara Diploma II sedangkan yang terendah di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 11,58 tahun atau setara kelas dua SLTA/SMK. Angka harapan lama sekolah di Sumatera Selatan di wilayah kota lebih tinggi dibanding kabupaten dan semua kabupaten/kota memiliki angka harapan lama sekolah di atas sebelas tahun.

Gambar 4.5
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota, 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



TARGET 4.3 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES YANG SAMA BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERHADAP PENDIDIKAN TEKNIK, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI, TERMASUK UNIVERSITAS, YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS

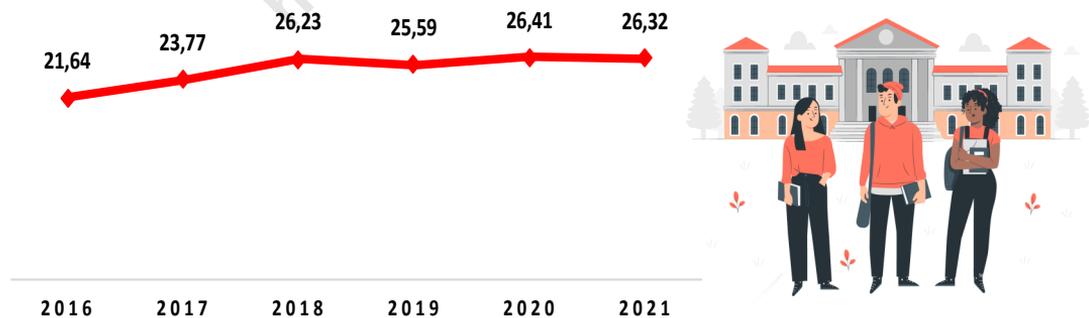
INDIKATOR 4.3.1.(A) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT

Sama dengan indikator 4.1.1(F) sehingga penjelasannya dapat dilihat pada indikator 4.1.1(F).

INDIKATOR 4.3.1.(B) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada level pendidikan perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan. Capaian nilai APK perguruan tinggi tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 26,32 persen, masih di bawah nilai APK Nasional yang sebesar 31,19 persen.

Gambar 4.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (tahun), 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



TARGET 4.4

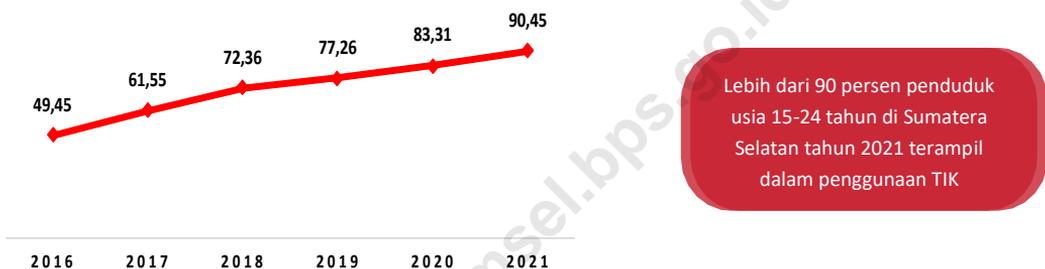
PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN JUMLAH PEMUDA DAN ORANG DEWASA YANG MEMILIKI KETERAMPILAN YANG RELEVAN, TERMASUK KETERAMPILAN TEKNIK DAN KEJURUAN UNTUK PEKERJAAN, PEKERJAAN YANG LAYAK DAN KEWIRAUSAHAAN

INDIKATOR 4.4.1

PROPORSI REMAJA DAN DEWASA DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI

Gambar 4.7

Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2016-2021

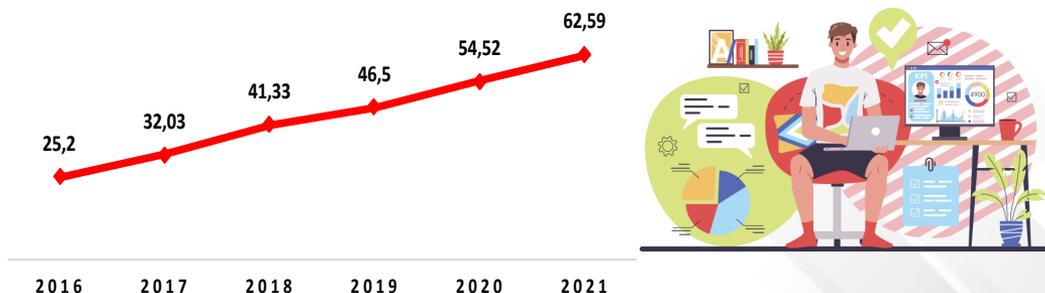


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Keterampilan TIK menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. Kurangnya keterampilan ini bisa menjadi hambatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kemajuan TIK. Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berusia 15-24 tahun sudah banyak yang terampil menggunakan TIK, terlihat dari capaian indikator ini yang naik signifikan. Pada tahun 2016, capainnya baru mencapai 49,45 persen dan naik menjadi 90,45 persen di tahun 2021. Begitupun dengan proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Gambar 4.8

Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



TARGET 4.5

PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN

INDIKATOR 4.5.1*

RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI [1] SD/MI/SEDERAJAT; [2] SMP/MTS/SEDERAJAT; 3]SMA/SMK/MA/SEDERAJAT; DAN RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI [4] PERGURUAN TINGGI

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SD/MI/ sederajat di Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 99,66 persen. Nilai indikator yang berada di bawah 100 persen menunjukkan bahwa penduduk laki-laki umur 7-12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD/MI/ sederajat lebih besar dibandingkan penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama.

Gambar 4.9

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SD/MI/ Sederajat, 2016-2021



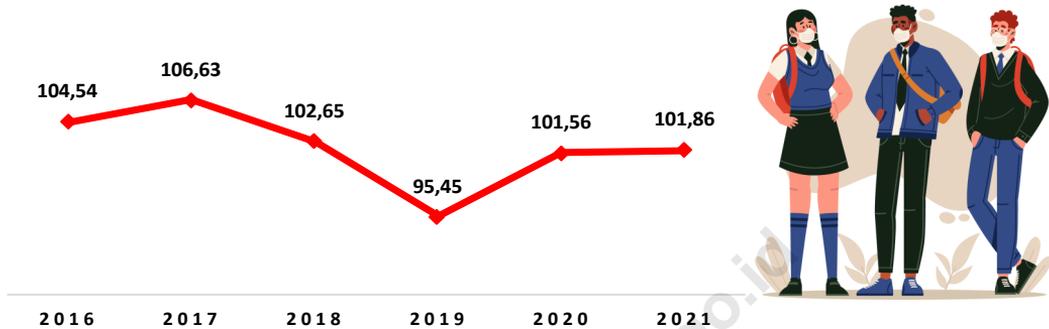
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Berbeda dengan level Pendidikan SD, untuk level Pendidikan SMP/MTS/ sederajat nilai APM laki-laki/perempuan tahun 2021 sebesar 101,86 persen yaitu berada di atas 100 persen. Ini berarti penduduk perempuan umur 13-15 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SMP/MTS/ sederajat lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur yang sama.



Gambar 4.10

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMP/MTS/ Sederajat, 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Rasio APM perempuan/ laki-laki pada jenjang SMA sederajat di Sumatera Selatan bernilai lebih dari 100 yang mencerminkan partisipasi penduduk perempuan umur 16-18 tahun untuk bersekolah tepat pada jenjang SMA sederajat lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2021 rasio APM SMA sederajat perempuan terhadap laki-laki sebesar 110,89 persen, naik dari tahun 2020 yang sebesar 102,06 persen. Penduduk laki-laki diduga memiliki kecenderungan untuk mencari nafkah atau bekerja sehingga memilih keluar dari sekolah sehingga partisipasi penduduk laki-laki lebih rendah.

Gambar 4.11

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/ Sederajat, 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



Pada jenjang perguruan tinggi, rasio APK perempuan/laki-laki juga bernilai lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan penduduk perempuan lebih tinggi partisipasi untuk bersekolah di Perguruan Tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan dapat mencapai pendidikan yang lebih tinggi, artinya kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi perempuan dengan laki-laki sudah terlihat. Dengan pendidikan yang tinggi, perempuan kini akan lebih

Gambar 4.12

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

TARGET 4.6

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA REMAJA DAN PROPORSI KELOMPOK DEWASA TERTENTU, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN, MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI

INDIKATOR 4.6.1(A)

PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR \geq 15 TAHUN

Angka melek aksara penduduk umur \geq 15 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 sebesar 98,78 persen. Ini artinya masih terdapat 1,22 persen penduduk umur \geq 15 tahun di Sumatera Selatan yang masih belum melek aksara. Capaian indikator ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2020 nilai capaian indikator ini sebesar 98,75 persen.

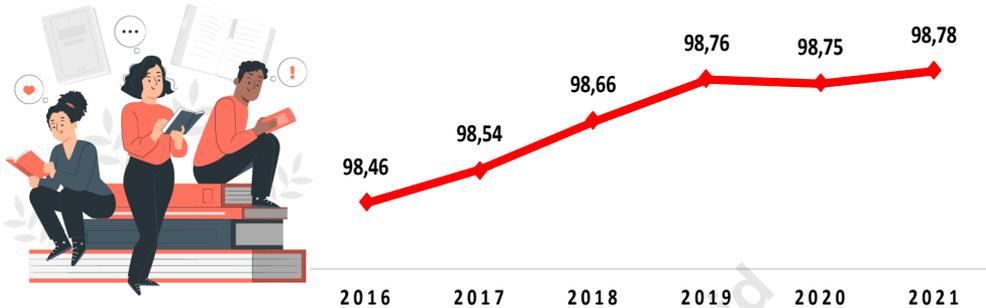


TUJUAN 4

Pendidikan Berkualitas

Gambar 4.13

Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun (persen), 2016-2021

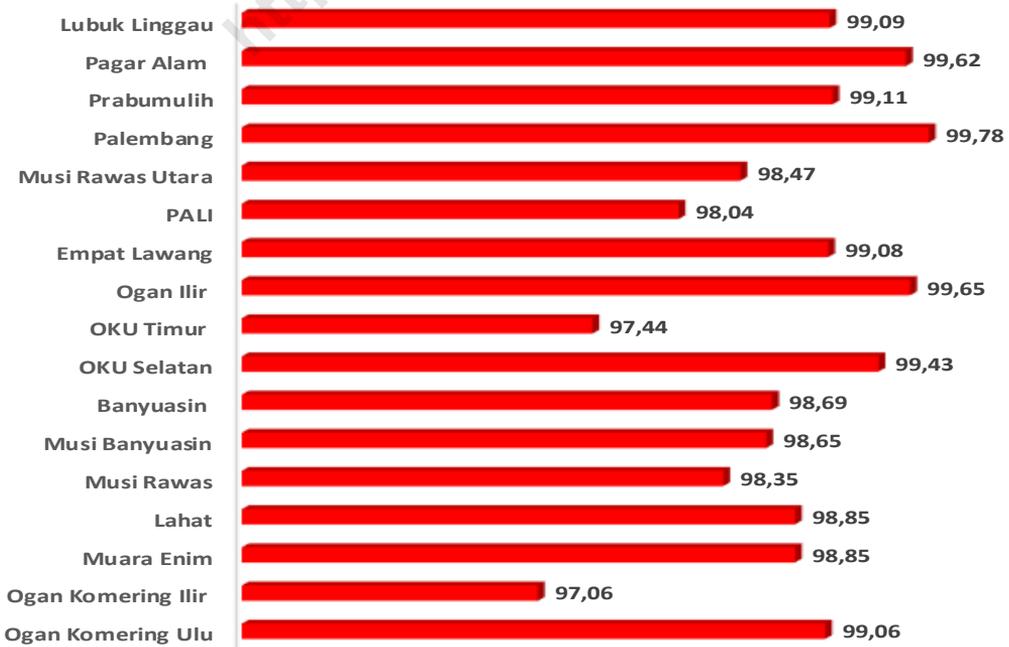


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Persentase Angka Melek Aksara tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi yaitu Kota Palembang sebesar 99,78 persen dan terendah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu 97,06 persen. Kabupaten/kota dengan nilai Angka Melek Aksara penduduk Umur ≥ 15 tahun di bawah nilai Provinsi 98,78 persen yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Banyuasin, OKU Timur dan Banyuasin.

Gambar 4.14

Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Kabupaten/Kota (persen), 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



INDIKATOR 4.6.1.(B) PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR 15-24 TAHUN DAN UMUR 15-59 TAHUN

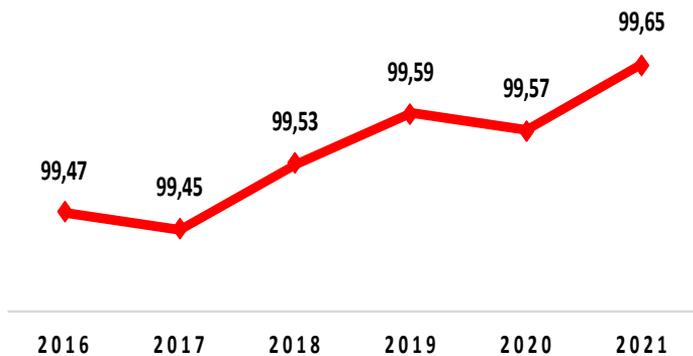
Gambar 4.15
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun (persen), 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dibandingkan penduduk umur 15 tahun ke atas, pada tahun 2021 persentase Angka Melek Aksara penduduk umur 15-24 tahun di Sumatera Selatan mencatatkan hasil yang lebih baik yaitu sebesar 99,95 persen. Sedangkan untuk penduduk Sumatera Selatan umur 15-59 tahun pada tahun 2021 nilai melek aksara sebesar 99,65 persen.

Gambar 4.16
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-59 Tahun (persen), 2016-2021



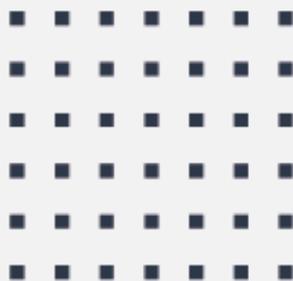
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



TUJUAN 5



**Mencapai Kesetaraan Gender
dan Memberdayakan Kaum Perempuan**



TUJUAN 5

Kesetaraan Gender



Kesetaraan gender yaitu merujuk kepada suatu keadaan yang setara dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penduduk laki-laki dan perempuan (Kementerian PPPA, 2017). Tercapainya kondisi kesetaraan gender dimungkinkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar diantaranya dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat menjalankan roda pembangunan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, mempromosikan kesetaraan gender merupakan bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka pengentasan diri dari jurang kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya penting dari sisi moralitas dan keadilan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender juga dianggap sangat penting dan relevan bagi perekonomian sebuah negara (Kementerian Keuangan, 2019).

TARGET 5.3 MENGHAPUSKAN SEMUA PRAKTIK BERBAHAYA, SEPERTI PERKAWINAN USIA ANAK, PERKAWINAN DINI DAN PAKSA, SERTA SUNAT PEREMPUAN

INDIKATOR 5.3.1* PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN SEBELUM UMUR 18 TAHUN

Gambar 5.1

Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun (persen), 2016-2021

2016		13,65
2017		13,29
2018		12,07
2010		13,53
2020		13,44
2021		12,24



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR)



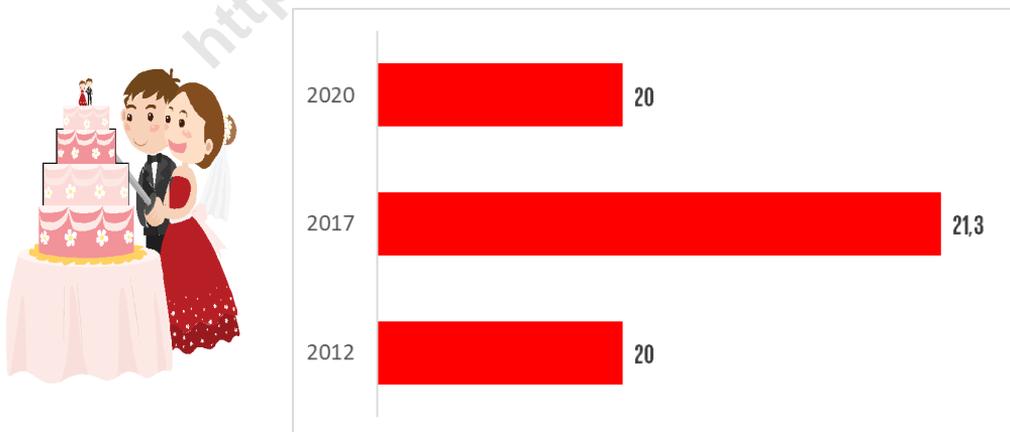
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jelas mengatur batasan umur laki-laki dan perempuan untuk kawin/menikah. Pernikahan di usia dini dikhawatirkan akan memberikan risiko kesehatan terhadap perempuan dan memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang menurun selama 2015-2018 dan sedikit meningkat di tahun 2019, kemudian menurun kembali di tahun 2020 dan 2021. Tahun 2021, sekitar 12,24 persen perempuan umur 20-24 tahun sudah kawin/ menikah atau hidup bersama sebelum berumur 18 tahun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 13,44 persen. Masih terdapat perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun perlu terus diperhatikan mengingat pemerintah telah merevisi batasan umur seseorang bisa melangsungkan perkawinan minimal berumur 19 tahun.

INDIKATOR 5.3.1 (A) MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 25-49 TAHUN

Gambar 5.2

Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun 2012, 2017 dan 2020



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR)

Median umur kawin pada tahun 2020 sebesar 20 menurun dari tahun 2017 yang sebesar 21,3. Namun demikian, median umur kawin sudah selaras dengan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 19 tahun.



INDIKATOR 5.3.1 (C) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK MA/ SEDERAJAT

Gambar 5.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat (persen), 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR)

Pendidikan yang berkualitas dan dapat dinikmati semua, baik laki-laki maupun perempuan merupakan langkah penting mencapai tujuan pembangunan dan untuk mengurangi ketimpangan gender. Tren APK SMA/SMK/MA/ sederajat tahun 2016- 2017 di Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Selanjutnya menurun ditahun 2018, namun kemudian meningkat kembali di tahun 2019 sampai 2021. Partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat tahun 2021 tercatat sebesar 82,30 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, APK SMA/SMK/MA/ sederajat laki-laki sebesar 79,24 persen, lebih kecil dari APK perempuan yang sebesar 85,50 persen. APK yang bernilai di bawah 100 persen mencerminkan bahwa daya serap penduduk pada jenjang SMA sederajat belum optimal. Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hanya 1 (satu) kota yang APK SMAnya diatas 100 yaitu Kota Palembang (102,30). Dan terendah di kabupaten Musi Rawas sebesar 61,17. Seiring perkembangan era industri 4.0 yang berjalan saat ini, kita dihadapkan pada kondisi dimana kompetensi dan daya saing menjadi kunci untuk memasuki pasar kerja. Partisipasi pendidikan yang semakin tinggi diharapkan mampu menjembatani tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, partisipasi sekolah pada jenjang SMA sederajat harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



TARGET 5.B MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

INDIKATOR 5.B.1* PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGAM

Gambar 5.4
Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (persen), 2020-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR)

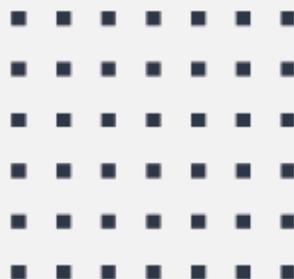
Zaman yang disebut sebagai era digital sekarang ini, penggunaan alat komunikasi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Salah satu alat komunikasi yang kerap ditemui dan dimiliki oleh masyarakat yaitu telepon genggam. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam tahun 2021 mencapai 64,53 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 60,68 persen. Jika dilihat dari proporsi individu memiliki Telepon genggam berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 tercatat proporsi penduduk laki-laki lebih banyak yang memiliki telepon genggam dibandingkan dengan perempuan yaitu 71,12 persen berbanding dengan 60,58 persen.



TUJUAN 8

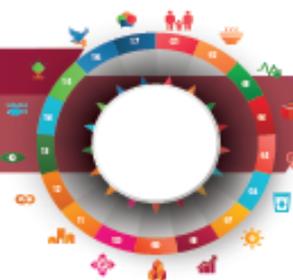


Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua



TUJUAN 8

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

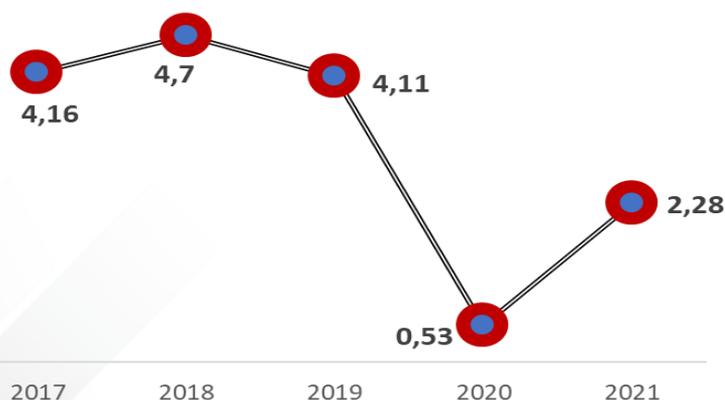


PDRB per kapita tahun 2017-2021 di Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sejalan dengan laju pertumbuhannya yang terus meningkat. Di tahun 2020, PDRB per kapita mengalami pertumbuhan melambat menjadi 0,53 persen, namun tahun 2021 pertumbuhan meningkat kembali menjadi 2,28 persen. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum di Sumatera Selatan di tahun 2017-2021 memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan kategori ini mengalami kontraksi hingga 7,21 persen. Di tahun 2021 kategori ini meningkat menjadi 4,43 persen, namun belum sebesar pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 15,34 persen. Untuk itu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

TARGET 8.1 **MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER KAPITA SESUAI DENGAN KONDISI NASIONAL DAN KHUSUSNYA SETIDAKNYA 7 PERSEN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PER TAHUN DI NEGARA BERKEMBANG**

Gambar 8.1

Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), 2017-2021

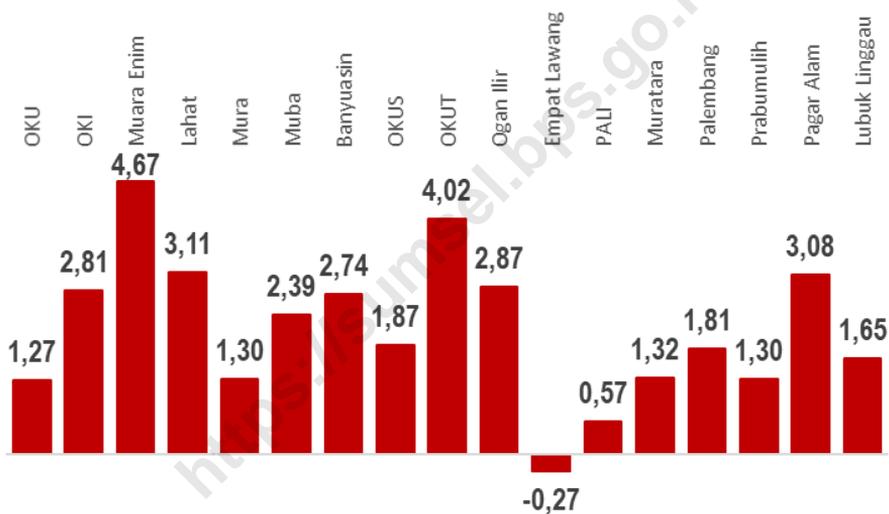


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR)



Selama periode 2017-2021 rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,16 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 4,70 persen. Sementara, nilai PDRB per Kapita Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang melambat menjadi hanya sebesar 0,53. Kontraksi ini turut dipengaruhi oleh penurunan perekonomian global saat pandemi Covid-19 terjadi. Namun demikian, pada tahun 2021, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tumbuh sebesar 2,28 persen.

Gambar 8.2
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Bila diamati menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, kecuali Kabupaten Empat Lawang yang mengalami kontraksi sebesar 0,27 persen. Pertumbuhan tertinggi di tempati oleh Kabupaten Muara Enim (4,67 persen), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (4,02 persen), dan Kota Pagar Alam (3,08 persen). Pendapatan per kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. PDRB per kapita Sumatera Selatan menunjukkan kenaikan dalam kurun waktu 2017-2021



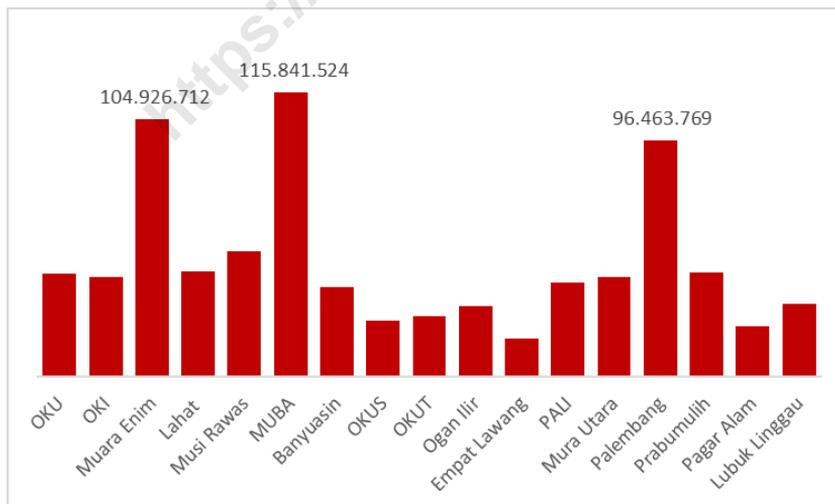
Pada tahun 2021, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan hingga mencapai 57,49 juta rupiah.

Gambar 8.3
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah), 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 8.4
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi tahun 2022 di tempati oleh Kabupaten Muba, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terkecil tahun 2020 di tempati oleh Kabupaten OKU selatan, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang.

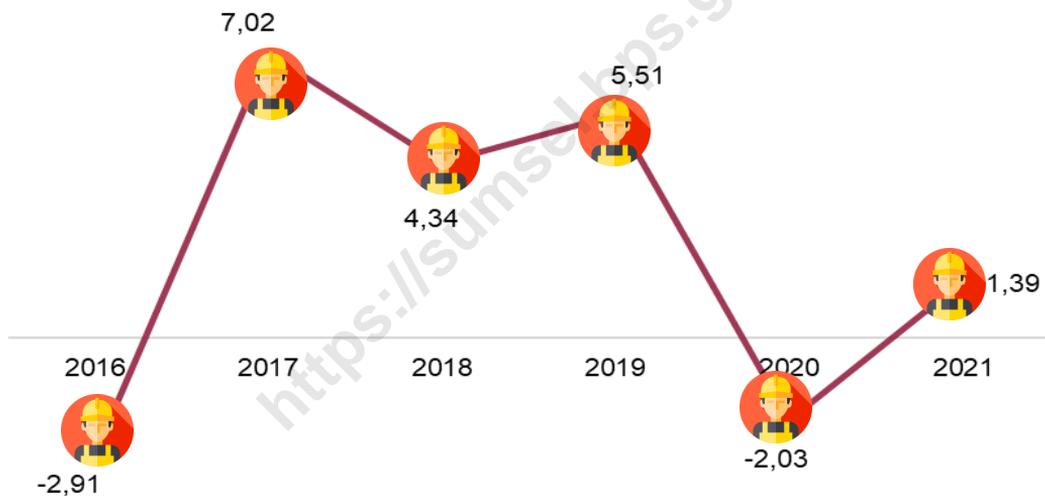


TARGET 8.2 **MENCAPAI TINGKAT PRODUKTIVITAS EKONOMI YANG LEBIH TINGGI, MELALUI DIVERSIFIKASI, PENINGKATAN DAN INOVASI TEKNOLOGI, TERMASUK MELALUI FOKUS PADA SEKTOR YANG MEMBERI NILAI TAMBAH TINGGI DAN PADAT KARYA**

INDIKATOR 8.2.1 **LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDRB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN**

Gambar 8.5

Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja / Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Berkerja per Tahun (persen), 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Indikator ini digunakan untuk melihat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selama tahun 2016-2021 produktivitas tenaga kerja di Sumatera Selatan menunjukkan adanya fluktuatif. Kecenderungan terkontraksi dalam di tahun 2016 tidak terlepas karena efek kris global sehingga pertumbuhan produktivitas menurun hingga minus 2,91 persen.

Pada tahun 2019 tercatat laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja sebesar 5,51 persen. Kemudian, di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar –2,03 persen disebabkan oleh pandemi Covid -19 yang mengakibatkan kontraksinya laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja/tingkat pertumbuhan PDRB ril per orang bekerja pertahun. Namun demikian di tahun 2021, tumbuh kembali menjadi 1,39 persen.



TARGET 8.3 MENGGALAKKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKTIF, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG LAYAK, KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI, DAN MENDORONG FORMALISASI DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TERMASUK MELALUI AKSES TERHADAP JASA KEUANGAN

INDIKATOR 8.3.1 PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR NON-PERTANIAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Gambar 8.6

Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian (persen), 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM. Selama empat tahun terakhir, terlihat proporsi lapangan kerja informal meningkat pada tahun 2017-2021 berturut-turut 42,15; 42,74; 44,61 persen; 49,42; serta 48,20.



TUJUAN 8

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

INDIKATOR 8.3.1.(A) PERSENTASE TENAGA KERJA FORMAL

Gambar 8.7
Persentase Tenaga Kerja Formal (persen), 2016-2021



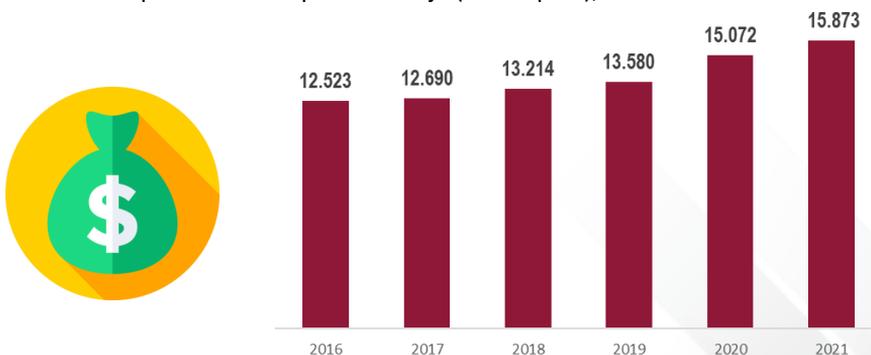
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Persentase tenaga kerja formal di Sumatera Selatan senantiasa meningkat pada periode tahun 2018-2019. Namun di tahun 2020, terjadi penurunan persentase tenaga kerja formal secara signifikan hingga menjadi 34,74 persen. Di tahun 2021, meningkat kembali menjadi 35,84 persen. Seperti pola yang terjadi secara nasional, di Sumatera Selatan angkatan kerja yang bekerja di sektor formal jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan yang bekerja di sektor informal.

TARGET 8.5

PADA TAHUN 2030, MENCAPAI PEKERJAAN TETAP DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERMASUK BAGI PEMUDA DAN PENYANDANG DIFABILITAS, DAN UPAH YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

Gambar 8.8
Upah Rata-Rata per Jam Kerja (ribu rupiah), 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan



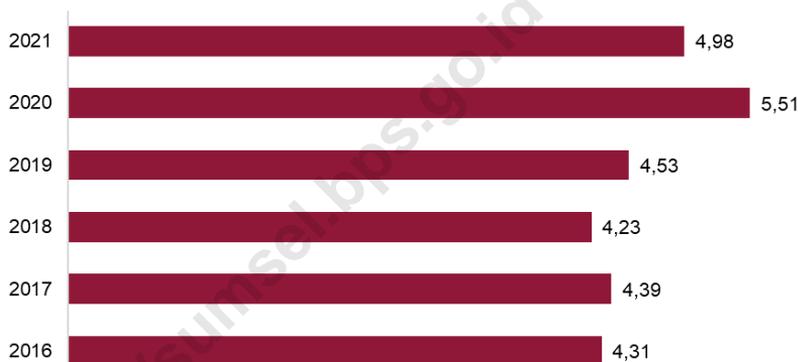
Upah rata-rata per jam kerja di Sumatera Selatan dalam enam tahun terakhir mengalami peningkatan. Upah rata-rata per jam kerja tahun 2021 meningkat 5,31 persen dari tahun sebelumnya.

INDIKATOR 8.5.2*

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Gambar 8.9

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Selama periode 2016-2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Selatan mengalami penurunan seperti skala nasional. Namun, pada tahun 2020, TPT di Sumatera Selatan Kembali meningkat menjadi 5,51 persen. Kemudian di tahun 2021, TPT mengalami penurunan menjadi 4,98 persen.

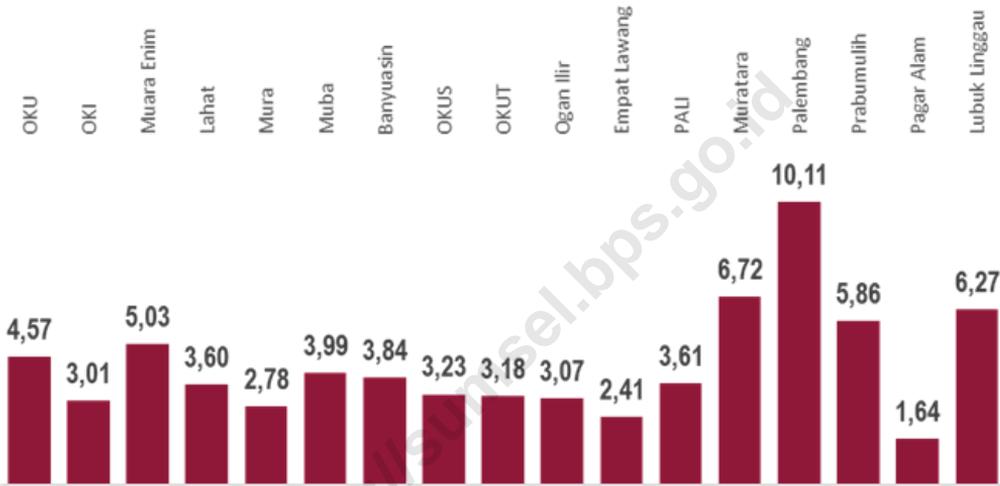
Secara absolut, angka pengangguran di Sumatera Selatan pada Tahun 2020 masih relatif tinggi yaitu sebesar 219,2 ribu orang. Hal ini menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung oleh lapangan kerja yang ada, sehingga menyebabkan mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Hal lain yang turut mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Selatan adalah perkembangan keadaan perekonomian secara global.

TPT di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, kemungkinan juga karena dipengaruhi oleh arus masuk



angkatan kerja dari daerah pedesaan atau dari daerah lainnya diluar Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten/kota yang masih didominasi daerah pedesaan mempunyai tingkat pengangguran terbuka yang rendah, seperti Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang yang cenderung berkarakteristik pedesaan masing-masing sebesar 1,64 persen dan 2,41 persen. Sedangkan Kota Palembang mempunyai tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu 10,11 persen.

Gambar 8.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR 8.5.2(A) TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN

Di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2021 tingkat setengah pengangguran angkanya sebesar 10,38 menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 12,98 persen. Mereka yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran dalam konsep ini adalah yaitu mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu dan masih mencari pekerjaan.

Dilihat menurut perbedaan daerah tempat tinggal, tingkat setengah pengangguran di pedesaan jauh lebih tinggi daripada tingkat setengah pengangguran di perkotaan, padahal TPT di daerah pedesaan justru jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Dari ilustrasi diatas dapat diketahui bahwa penduduk di pedesaan memang lebih banyak yang bekerja dibandingkan perkotaan, akan tetapi banyak yang bekerja pada sektor-sektor informal dan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

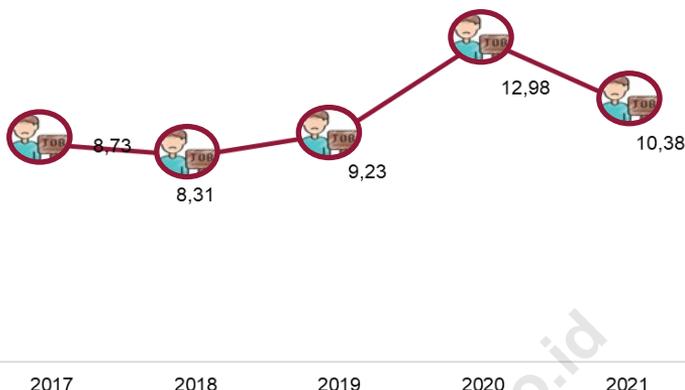
Pada tahun 2021, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 11,94 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 9,35 persen. Bila dibandingkan tahun 2020, baik setengah pengangguran laki-laki dan perempuan mengalami penurunan.



TUJUAN 8

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

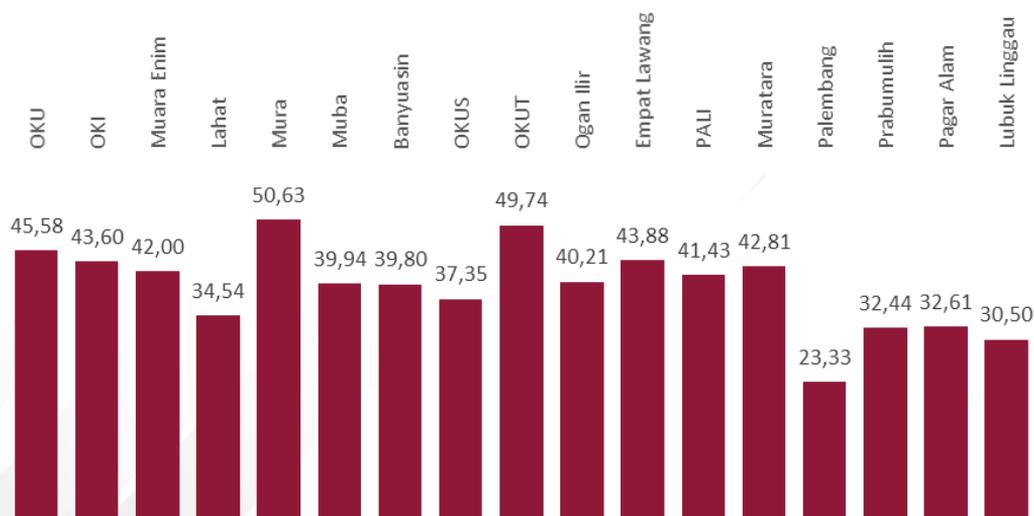
Gambar 8.11
Tingkat Setengah Pengangguran (persen), 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, hampir diseluruh kabupaten/kota di seluruh Sumatera Selatan mempunyai tingkat setengah pengangguran yang cenderung tinggi. Bahkan bila diamati lebih lanjut, kabupaten-kabupaten dengan dominasi daerah pedesaan seperti Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten OKU Timur memiliki tingkat setengah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari sini dapat di duga bahwa penduduk yang bekerja pada kabupaten tersebut sebagian besar dari mereka termasuk dalam kelompok setengah pengangguran adalah para pekerja keluarga di sektor pertanian.

Gambar 8.12
Tingkat Setengah Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



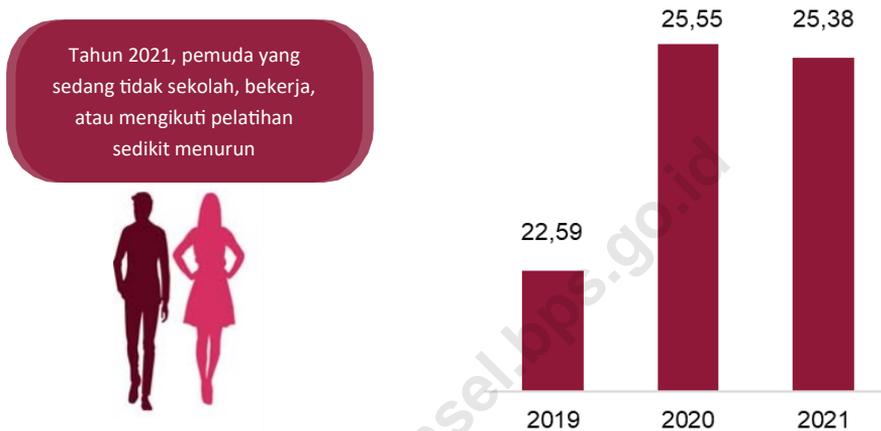
TUJUAN 8

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

INDIKATOR 8.6.1 PERSENTASE USIA MUDA (15-24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)

Gambar 8.13

Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (persen), 2019-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan cenderung menurun. Ada sebesar 25,38 pemuda yang tidak mengalami bekerja, sekolah, atau pelatihan pada tahun 2021, menurun sedikit dari tahun 2020 yang sebesar 25,55 persen.

INDIKATOR 8.6.2 PROPORSI KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB

Gambar 8.14

Proporsi Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen), 2019-2021



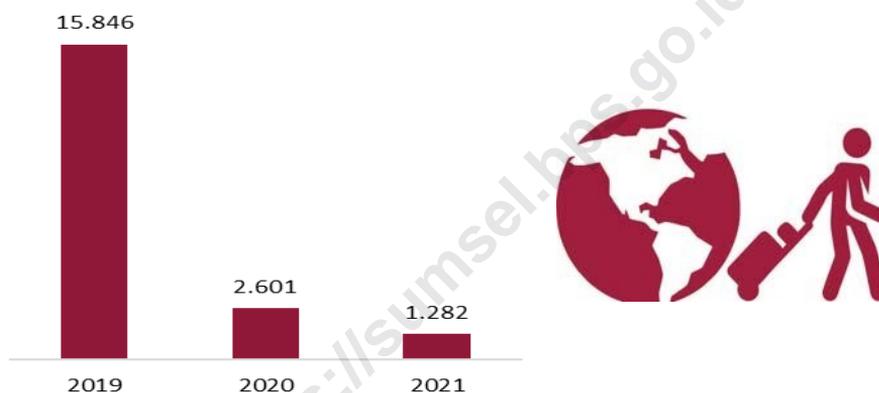
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan



Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Selatan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 5,89 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 5,94 persen.

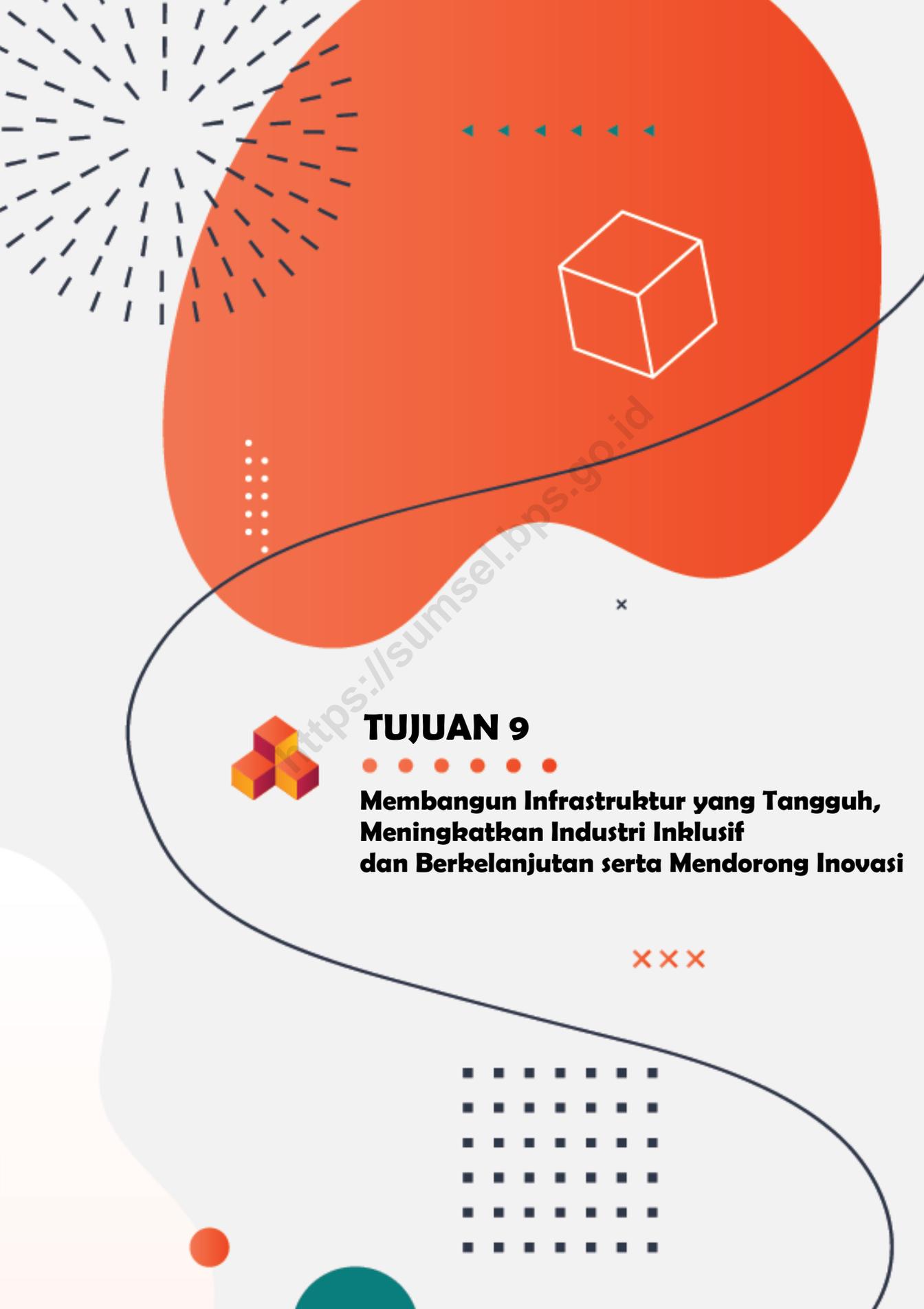
INDIKATOR 8.9.1. (A) PERSENTASE USIA MUDA (15-24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)

Gambar 8.15
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang), 2019-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) di Sumatera Selatan tercatat sebesar 15.846 orang, selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar menjadi hanya sebesar 2.601 orang. Kemudian di tahun 2021, jumlah wisman kembali mengalami penurunan menjadi 1.282 orang.



TUJUAN 9



**Membangun Infrastruktur yang Tangguh,
Meningkatkan Industri Inklusif
dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi**



TUJUAN 9

Infrastruktur, Industri dan Inovasi



Aspek penting pembangunan berkelanjutan pada tujuan 9 adalah infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

TARGET 9.2 **MEMPROMOSIKAN INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, DAN PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PROPORSI INDUSTRI DALAM LAPANGAN KERJA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO, SEJALAN DENGAN KONDISI NASIONAL, DAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSINYA DI NEGERA KURANG BERKEMBANG.**

INDIKATOR 9.2.1 **PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDRB DAN PERKAPITA**

INDIKATOR 9.C.1.(B) LAJU PERTUMBUHAN NILAI TAMBAH INDUSTRI MANUFAKTUR CENDERUNG MENURUN, HAL INI SEJALAN DENGAN KONTRIBUSINYA YANG TERUS MENURUN DALAM PEREKONOMIAN SUMATERA SELATAN. PADA TAHUN 2016 PERTUMBUHANNYA SEBESAR 6,23 PERSEN LALU TUMBUH PADA TAHUN 2017 MENJADI 6,55 PERSEN. PERTUMBUHAN NILAI TAMBAH INDUSTRI MANUFAKTUR TERUS MENURUN HINGGA SEBESAR 4,82 PERSEN DI TAHUN 2019 LALU MEROSOT MENJADI 0,72 PERSEN PADA TAHUN 2020, HINGGA MENCAPI 2,30 PERSEN DI TAHUN 2022

Gambar 9.1

Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2016-2021

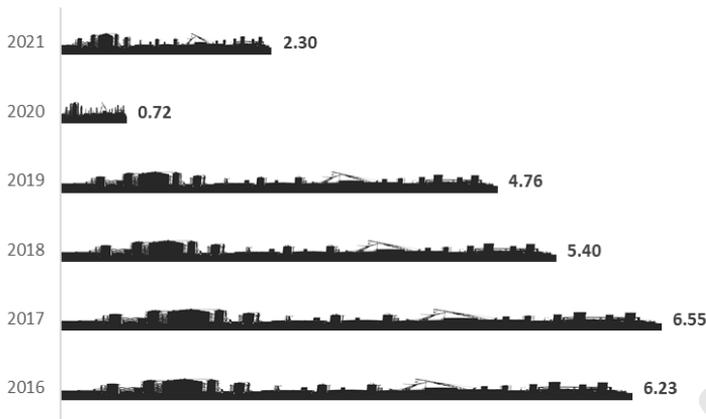


Sumber : BPS



Gambar 9.2

Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2016-2021



Pandemi Covid-19 yang tersebar di Awal Maret 2020, memukul sektor industri hingga turun menjadi 0,69 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia di kala pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar

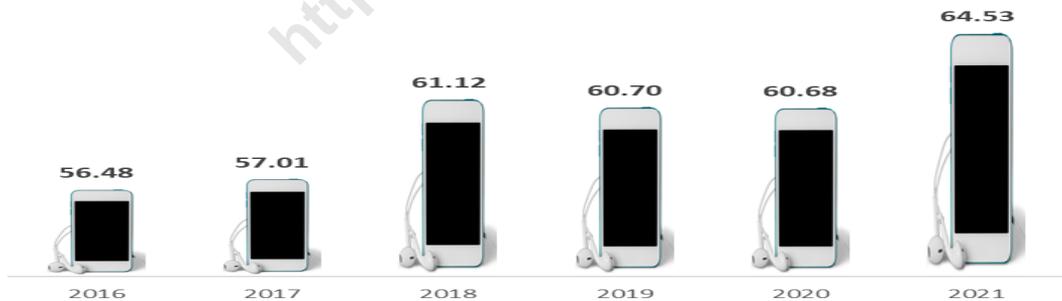
Catatan : * : Angka Sementara
** : Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS

INDIKATOR 9.C.1.(A) PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGAM

Gambar 9.3

Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telpn Genggam (persen), 2016-2021



Sumber : BPS



Secara umum penduduk yang menguasai/memiliki telepon selular (HP)/nirkabel di setiap tahun selalu meningkat hingga tahun 2019. Namun, adanya kebijakan untuk membatasi mobilitas penduduk guna menekan laju penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut tentunya berdampak pada keinginan individu untuk memiliki gawai yang terbaru ditunda karena adanya kebijakan PSBB dimana hanya aktivitas penting saja yang diizinkan untuk keluar rumah.

INDIKATOR 9.C.1.(B) PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET

Gambar 9.4
Proporsi Individu yang Menggunakan Internet (persen), 2016-2021



Sumber : BPS

Internet menjadi alat yang penting bagi public untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Penggunaan internet di sini termasuk dalam mengakses media sosial seperti facebook, instagram, twitter, titktok, whatsapp, dan lain-lain.



x

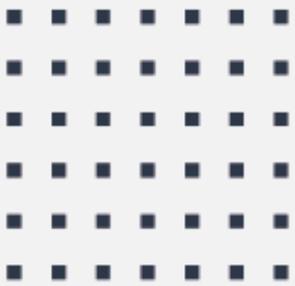


TUJUAN 10



Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

xxx



TUJUAN 10

Mengurangi Ketimpangan



Kesenjangan dapat terjadi dalam suatu negara atau antarnegara, adanya kesenjangan dapat mengancam pembangunan dalam jangka panjang, baik dari sisi pembangunan sosial maupun ekonomi. Kesenjangan juga akan mengganggu penurunan kemiskinan dan apabila dibiarkan akan menimbulkan tindak kriminal dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian penurunan kesenjangan harus disegerakan baik di dalam negara sendiri maupun antarnegara.

TARGET 10.1

BERKURANGNYA KESENJANGAN

INDIKATOR 10.1.1*

KOEFISIEN GINI

Gambar 10.1
Koefisien Gini, 2016-2021



Sumber : BPS

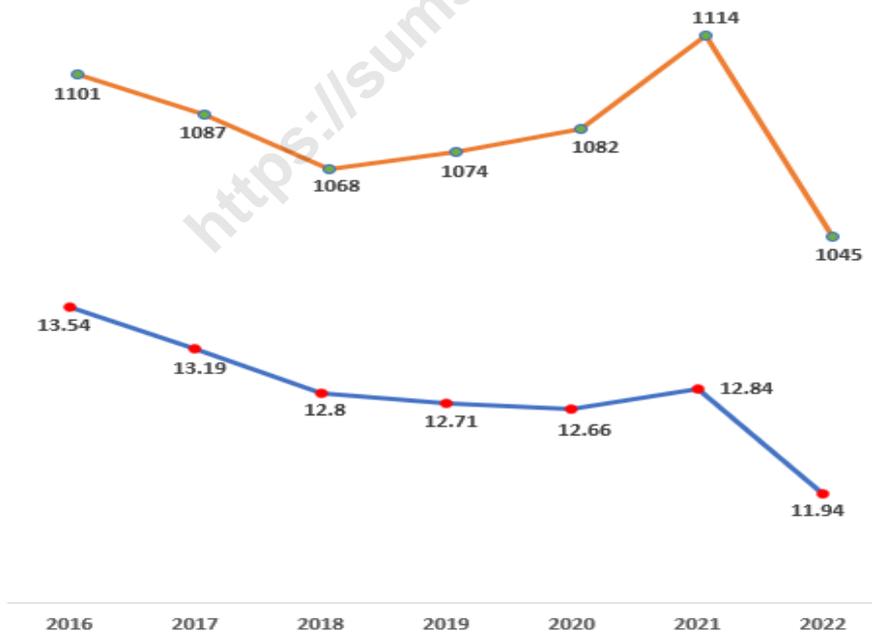
Nilai koefisien gini cenderung meningkat pada periode 2016-2021, menandakan adanya kecenderungan kenaikan ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini tahun 2021 sebesar 0,34. Berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah pedesaan lebih timpang dibandingkan daerah perkotaan.



INDIKATOR 10.1.1.(A) PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN SUMATERA SELATAN

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disebut dengan penduduk miskin. Setelah beberapa tahun mengalami penurunan, pada tahun 2022 penduduk miskin di Sumatera Selatan menurun 0,94 poin menjadi 11,90 persen. Masa pemulihan ekonomi dari pasca COVID-19 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan, salah satunya adalah karena Pandemi Covid-19, dimana diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona. Dengan PSBB menyebabkan aktivitas perekonomian terganggu dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan penduduk, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survey sosial demografi BPS, kelompok bawah atau masyarakat berpendapatan rendah, sekitar 70 persen mengaku mengalami penurunan pendapatan.

Gambar 10.2
Persentase (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang), 2016-2022



Sumber : BPS

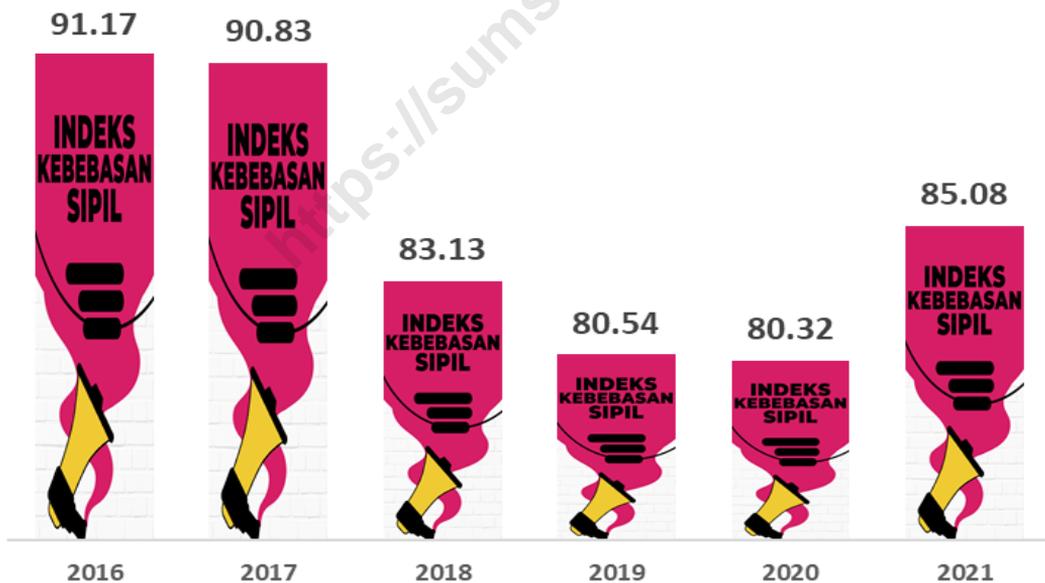


TARGET 10.3 MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESENJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT

INDIKATOR 10.3.1(A) INDEKS KEBEBASAN SIPIL

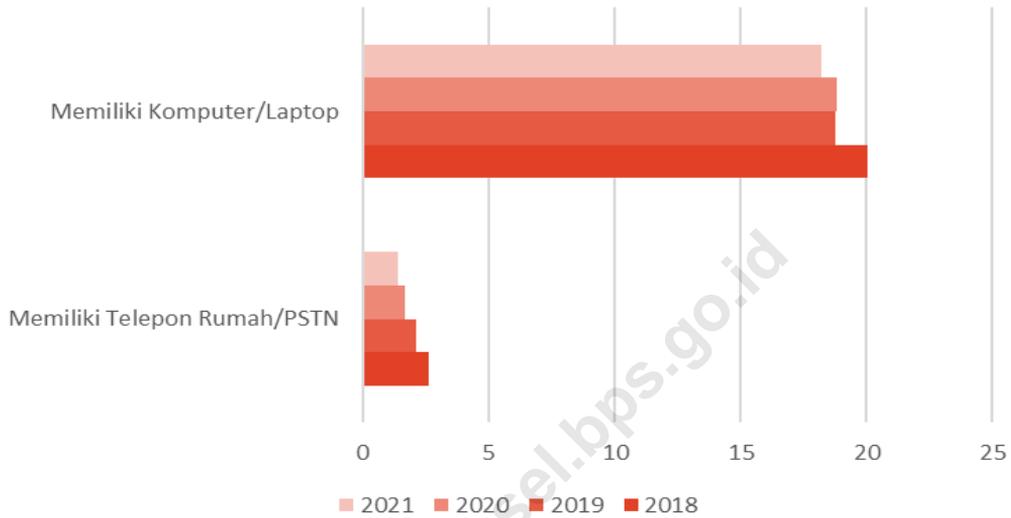
Tingkat kebebasan sipil dikategorikan “baik” apabila nilai indeks lebih dari 80, “sedang” apabila nilai indeks berkisar 60 – 80 dan “buruk” apabila nilai indeks kurang dari 60. Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan cenderung menurun dari tahun 2016 dengan kategori baik. Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan 2020 sebesar 80,32 belum mencapai target Rencana Aksi Daerah (RAD) 2020, yaitu sebesar 93,02.

Gambar 10.3
Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan (persen), 2016-2021



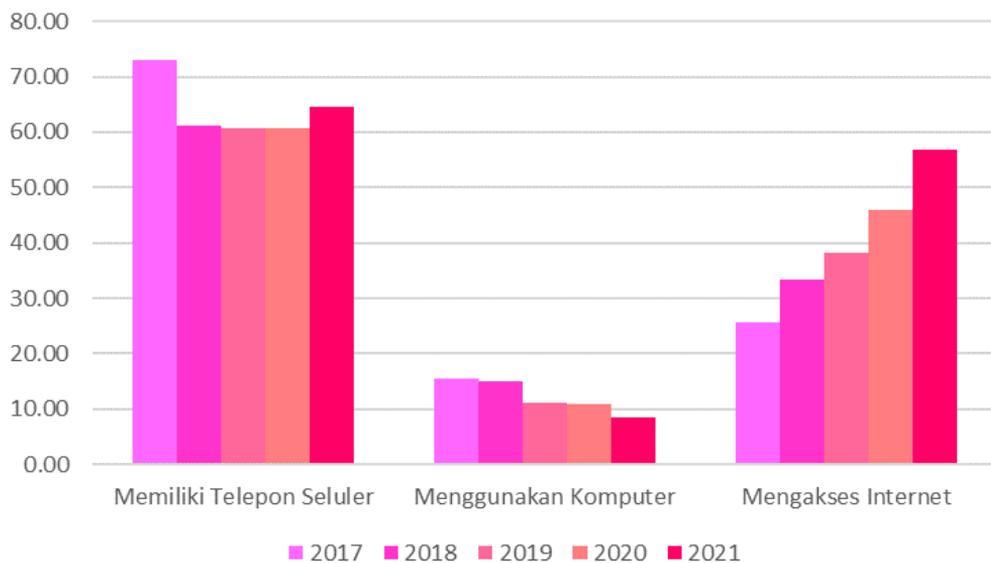
Sumber : BPS

Gambar 10.4
Rumah Tangga Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2018-2021



Sumber : BPS

Gambar 10.5
Penduduk Sumatera Selatan 5 Tahun ke Atas Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2017-2021



Sumber : BPS



Tabel 10.1
Rumah Tangga Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses
Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2020-2021

Kabupaten/Kota	Memiliki Telepon Rumah 2020	Memiliki Telepon Rumah 2021	Memiliki Komputer 2020	Memiliki Komputer 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ogan Komering Ulu	1,35	1,06	13,02	15,25
Ogan Komering Ilir	0,23	0,46	8,09	6,35
Muara Enim	0,36	1,01	16,48	15,49
Lahat	0	1,7	13,72	14,33
Musi Rawas	0	0,23	7,59	9,43
Musi Banyuasin	0,38	0	10,41	10,22
Banyuasin	0,15	0,49	11,96	11,45
OKU Selatan	0	0	5,51	5,82
OKU Timur	0,12	0,35	7,48	9,91
Ogan Ilir	0	0,3	12,34	14,25
Empat Lawang	0,27	0,84	9,45	6,73
PALI	0	0	8,84	11,06
Musi Rawas Utara	0,23	0,12	6,23	9,37
Palembang	3,56	4,56	31,72	27,39
Prabumulih	2,37	0,78	22,49	26,74
Pagar Alam	0,42	0,49	13,37	13,72
Lubuk Linggau	1,73	3,25	24,77	27,89
Sumatera Selatan	0,93	1,32	14,97	14,57

Sumber : BPS



Tabel 10.2
Penduduk 5 Tahun ke Atas Sumatera Selatan menurut Beberapa Indikator Akses
Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2020-2021

Kabupaten/Kota	Penduduk 5+					
	Memiliki Telepon Selular	Memiliki Telepon Selular	Menggunakan Komputer	Menggunakan Komputer	Mengakses Internet	Mengakses Internet
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	60,10	65,70	11,50	10,63	48,84	65,53
(02) Ogan Komering Ilir	56,44	61,76	3,98	4,70	38,17	51,24
(03) Muara Enim	61,79	62,21	11,75	5,60	44,84	54,35
(04) Lahat	62,94	62,96	10,79	6,52	43,81	53,09
(05) Musi Rawas	55,99	58,36	6,72	4,01	36,41	45,42
(06) Musi Banyuasin	56,89	63,79	6,84	5,77	39,65	50,68
(07) Banyuasin	56,93	60,75	7,33	4,98	43,32	53,90
(08) OKU Selatan	51,70	57,06	6,27	3,86	26,52	39,54
(09) OKU Timur	52,85	55,95	9,22	5,90	40,69	53,37
(10) Ogan Ilir	58,43	61,68	8,18	5,61	41,71	53,58
(11) Empat Lawang	49,40	49,57	7,17	4,85	28,91	34,48
(12) PALI	55,78	57,14	7,93	3,98	36,56	45,36
(13) Musi Rawas Utara	51,86	53,46	6,03	4,73	34,23	40,87
(71) Palembang	73,00	79,40	19,91	18,47	65,74	76,43
(72) Prabumulih	66,26	71,05	17,36	12,95	56,44	70,70
(73) Pagar Alam	67,79	65,31	12,83	12,02	47,69	53,98
(74) Lubuk Linggau	68,86	67,74	19,99	13,37	58,31	63,68
Sumatera Selatan	60,68	64,53	10,89	8,56	46,00	56,89

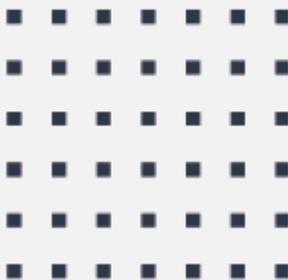
Sumber : BPS



TUJUAN 11



**Menjadikan Kota dan Permukiman
Inklusif, Aman, Tangguh dan
Berkelanjutan**



TUJUAN 11

Kota dan Komunitas Berkelanjutan



Proyeksi pada tahun 2030 lebih dari enam puluh persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan daerah perkotaan dalam aspek perekonomian yang lebih efisien pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, transportasi dan jasa. Dengan perencanaan dan manajemen resiko yang baik, maka kota dapat dijadikan inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan penggerak dari pembangunan berkelanjutan.

Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan. Pada indikator ini, data yang tersedia merupakan data proporsi.

TARGET 11.1 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN YANG LAYAK, AMAN TERJANGKAU, TERMASUK PENATAAN KAWASAN KUMUH, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR PERKOTAAN

INDIKATOR 11.1.1(A) JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU

Gambar 11.1
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (persen), 2017-2021



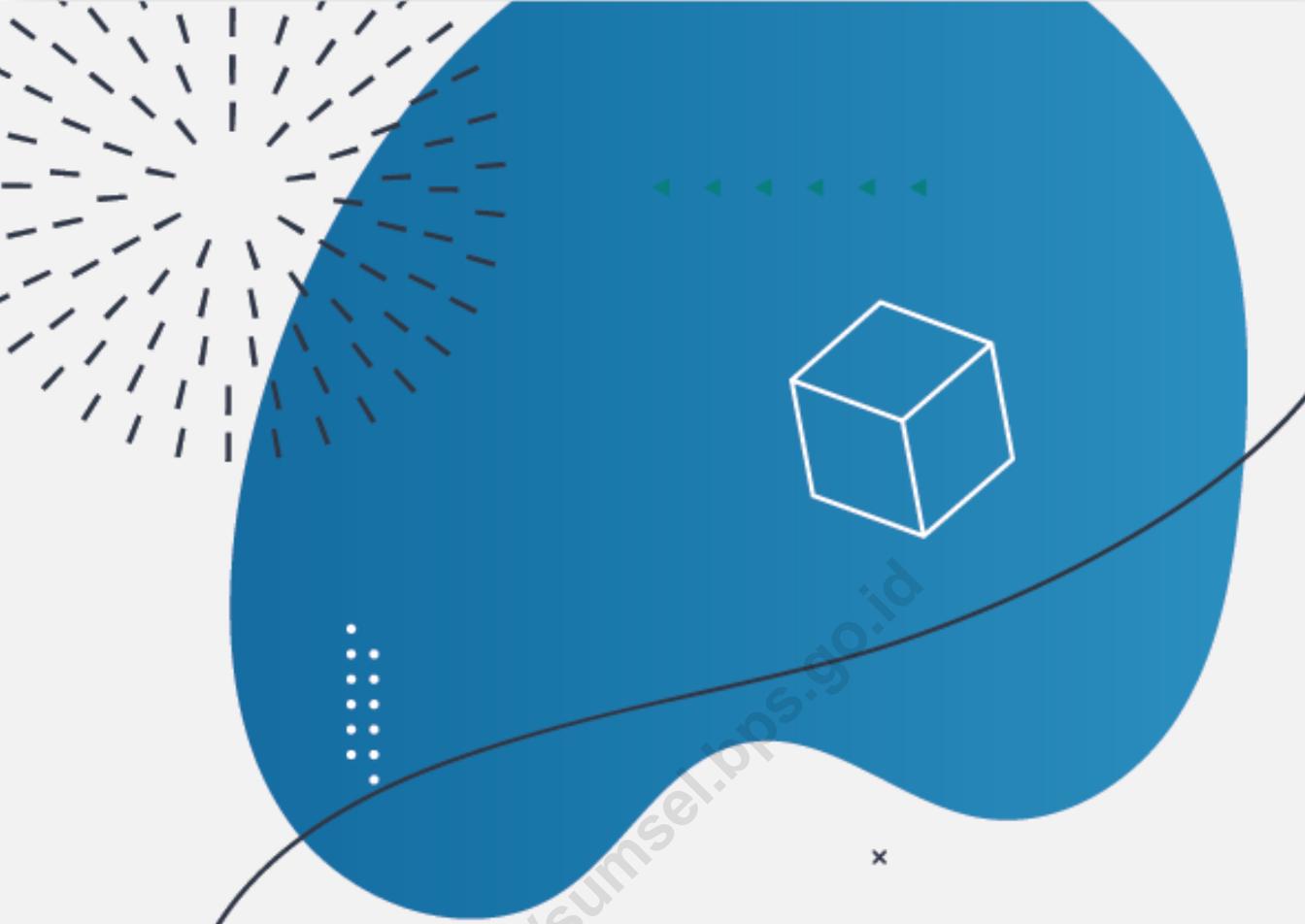
Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni mengalami peningkatan di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



Akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan hak dan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Pada tahun 2017-2018, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau nilainya cukup tinggi. Tercatat di tahun 2018, sebesar 94,54 persen rumah tangga telah memiliki akses hunian layak dan terjangkau. Sejak tahun 2019, terjadi perubahan konsep dan definisi perhitungan pada komponen pembangunannya, yaitu air minum layak dan sanitasi layak. Dengan konsep dan definisi baru tersebut, sebanyak 52,24 persen di tahun 2019 dan 55,25 persen di tahun 2020 serta semakin meningkat menjadi 57,86 persen di tahun 2021 untuk rumah tangga telah memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi Sumatera Selatan.

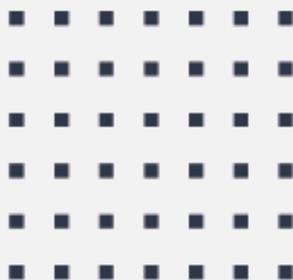
<https://sumsel.bps.go.id>



TUJUAN 16



Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan



TUJUAN 16

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh



Perwujudan masyarakat yang adil, damai dan inklusif membutuhkan peran yang komprehensif, realistis, efisien dan transparan. Pembangunan berkelanjutan harus mampu mengatasi berbagai ancaman kejahatan seperti ancaman pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan manusia. Selain mengakhiri kekerasan, promosi supremasi hukum dan penguatan institusi di setiap tingkatan dapat menjadi langkah dalam mencapai tujuan ini. Perlindungan terhadap korban kekerasan, tindak kejahatan dan eksploitasi juga perlu terus ditingkatkan untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan pemenuhan hak asasi manusia. Teratasinya tantangan tersebut tentu dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang inklusif dan damai, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

TARGET 16.1

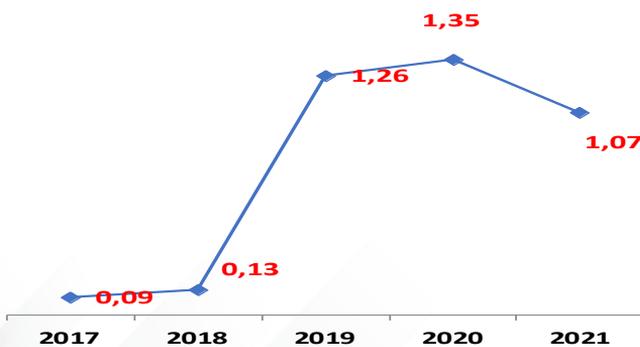
SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN TERKAIT ANGKA KEMATIAN DIMANAPUN

INDIKATOR 16.1.3.(A)

PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Gambar 16.1

Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2017-2021



Sumber : BPS, SUSENAS (diolah)

Pada tahun 2021, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan di Sumatera Selatan mengalami penurunan dibanding tahun 2020

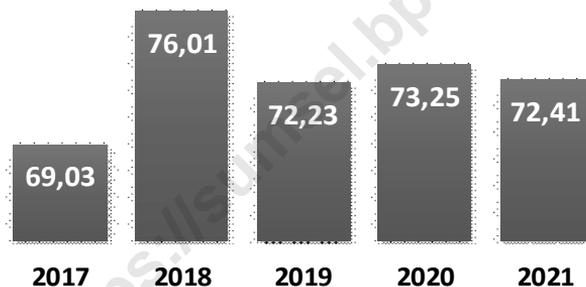


Kejahatan kekerasan dalam konteks ini mencakup penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual. Dalam dua tahun terakhir, penduduk yang mengalami kekerasan di Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Peningkatan proporsi kejahatan kekerasan ini menandakan masih perlunya upaya pencegahan dan pengamanan lingkungan di Sumatera Selatan, terutama di wilayah rawan kekerasan.

TARGET 16.7 MENJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN

INDIKATOR 16.7.2.(A) INDEKS LEMBAGA DEMOKRASI

Gambar 16.2
Indeks Kelembagaan Demokrasi, 2017-2021



Sumber : BPS dan Kemenko Polhukam (IDI)

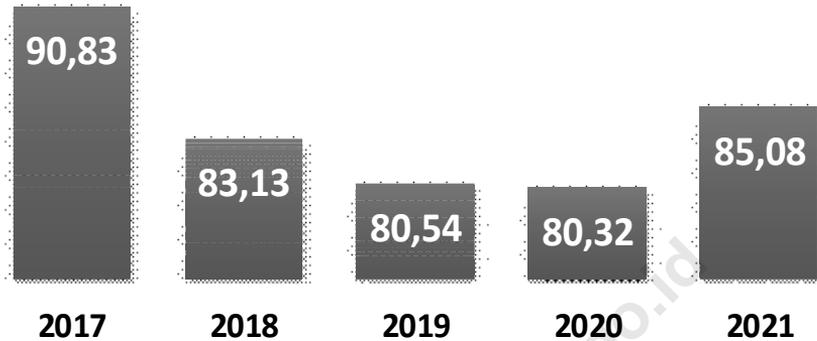
Indeks Kelembagaan Demokrasi mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen. Walaupun indeks lembaga demokrasi sempat menurun pada tahun 2016, indikator ini membaik pada tahun 2018, menurun di tahun 2019, kembali meningkat di tahun 2020. Dengan menggunakan metode baru, Indeks Kelembagaan Demokrasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 72,41.

INDIKATOR 16.7.2.(B) INDEKS KEBEBASAN SIPIL

Kebebasan individu sebagai warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diukur dengan Indeks Kebebasan Sipil. Selama tahun 2017-2020, indeks kebebasan sipil di Sumatera Selatan mengalami penurunan. Di tahun 2021, indeks mengalami peningkatan menjadi 85,08 dibanding tahun 2020 yang sebesar 80,32. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebebasan individu dan kelompok dalam berkumpul, berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.



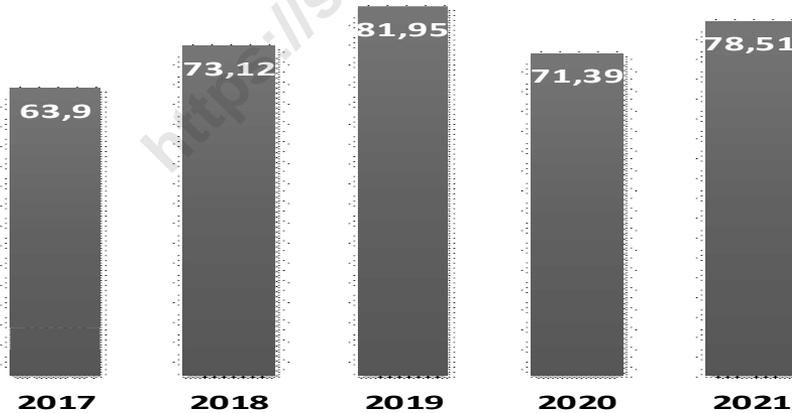
Gambar 16.3
Indeks Kebebasan Sipil, 2017-2021



Sumber : BPS dan Kemenko Polhukam (IDI)

INDIKATOR 16.7.2.(C) INDEKS HAK-HAK POLITIK

Gambar 16.4
Indeks Hak-Hak Politik, 2017-2021



Sumber : BPS dan Kemenko Polhukam (IDI)

Capaian Indeks Hak-Hak Politik Sumatera Selatan sepanjang tahun 2017-2019 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada periode 2017-2019 indeks ini memiliki trend yang meningkat sebelum kembali menurun di tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 78,51 di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak-hak politik warga negara dalam hal memilih/dipilih maupun berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di pemerintahan dan lembaga legislatif pada tahun 2021 mengalami perbaikan.

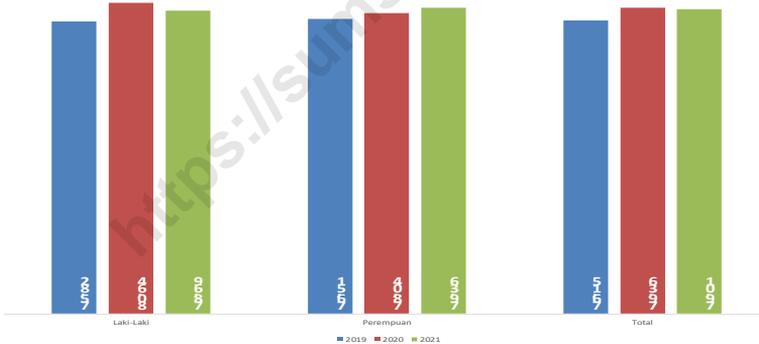


TARGET 16.9 PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SYAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN

INDIKATOR 16.9.1* Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil

Akta kelahiran adalah dokumen resmi negara yang merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Persentase anak umur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 79,36 persen. Persentase tersebut sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 79,01 persen. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran dikhawatirkan berdampak pada rendahnya jaminan pengakuan anak di hadapan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan pelayanan kesehatan dan kemiskinan.

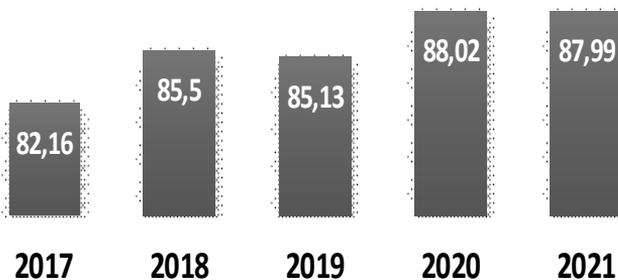
Gambar 16.5
Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021



Sumber : BPS, SUSENAS (diolah)

INDIKATOR 16.9.1.(A) PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA LAHIR UNTUK PENDUDUK 40% BERPENDAPATAN RENDAH

Gambar 16.6
Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah dan yang Memiliki Akta Kelahiran, 2017-2021



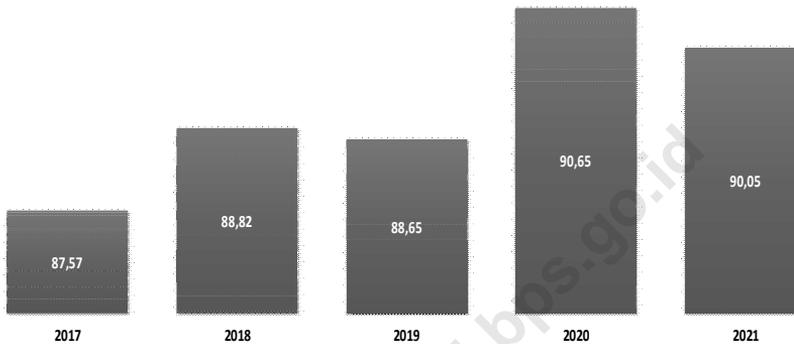
Sumber : BPS, SUSENAS (diolah)



INDIKATOR 16.9.1.(B) PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

Gambar 16.7

Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah dan yang Memiliki Akta Kelahiran, 2017-2021



Sumber : SUSENAS, Badan Pusat Statistik

Secara umum, persentase anak di Sumatera Selatan yang memiliki akte kelahiran mencapai sekitar 90,05 persen. Angka tersebut cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa jaminan pengakuan anak di mata hukum semakin meningkat dari tahun ke tahun.



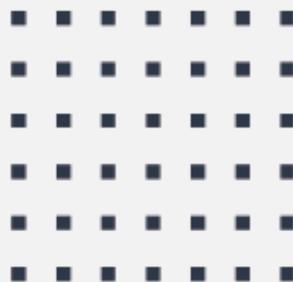
TUJUAN 17



**Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk
Pembangunan Berkelanjutan**

x

xxx



TUJUAN 17

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

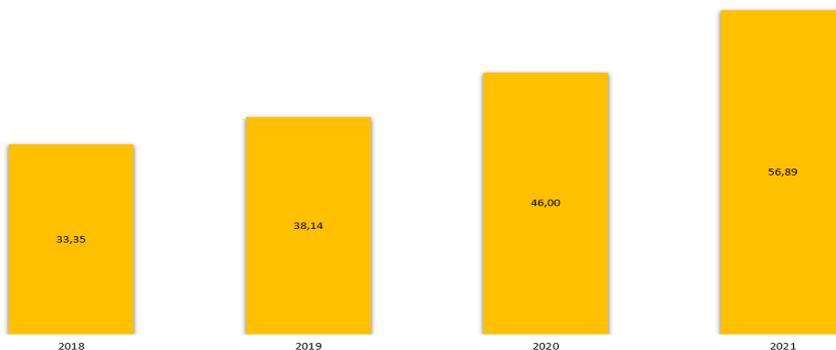


Agenda pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan terjalinya kemitraan dan kerja sama global yang kuat. Kemitraan yang inklusif dijalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta dibangun atas prinsip, visi, dan tujuan bersama. Kerja sama di tingkat internasional juga harus ditingkatkan guna memastikan dan memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan internasional harus dapat mendukung negara berkembang dalam mempromosikan perdagangan internasional, investasi, dan meningkatkan ekspor. Dengan demikian, sistem perdagangan yang berdasarkan peraturan yang adil universal, terbuka dan menguntungkan bagi semua dapat tercapai.

TARGET 17.1 MENGOPERASIONALISASIKAN SECARA PENUH BANK TEKNOLOGI DAN SAINS, MEKANISME PEMBANGUNAN KAPASITAS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2017 DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Gambar 17.1

Proporsi Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet, 2017-2021



Sumber : BPS, SUSENAS



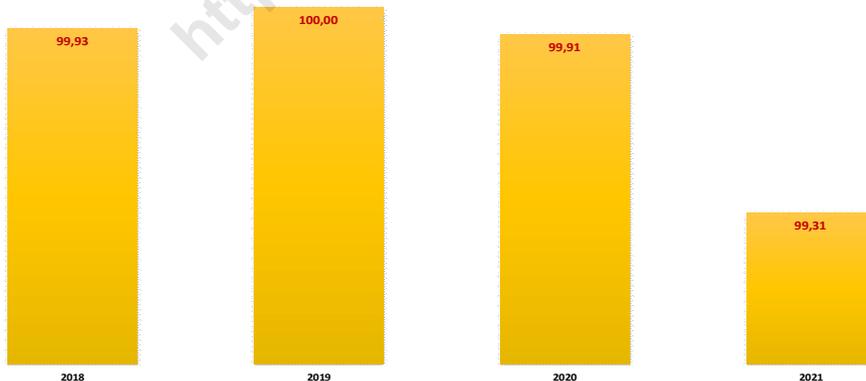
Selama tahun 2017-2021, persentase penduduk Sumatera Selatan yang menggunakan internet terus mengalami peningkatan hingga mencapai 56,89 persen di tahun 2021. Peningkatan tersebut menunjukkan peran internet sebagai media informasi dan komunikasi seiring dengan adanya pembangunan teknologi informasi dan perkembangan masyarakat digital.

TARGET 17.18 PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, UNTUK MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN KETERSEDIAAN DATA BERKUALITAS TINGGI, TEPAT WAKTU DAN DAPAT DIPERCAYA, YANG TERPILAH BERDASARKAN PENDAPATAN, GENDER, UMUR, RAS, ETNIK, STATUS MIGRASI, DIFABILITAS, LOKASI GEOGRAFIS DAN KARAKTERISTIK LAINNYA YANG RELEVAN DENGAN KONTEKS SOSIAL

INDIKATOR 17.18.1.(A) PERSENTASE KONSUMEN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) YANG MERASA

Gambar 17.2

Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik, 2018-2021



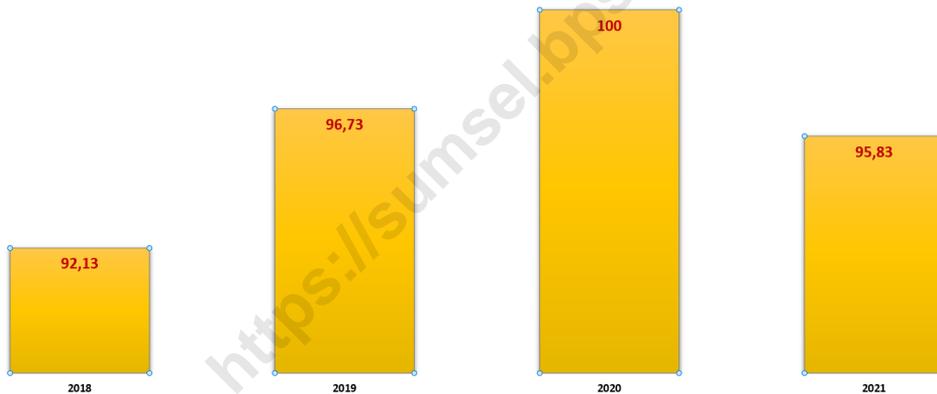
Sumber : BPS, Survei Kebutuhan Data



Peningkatan ketersediaan data berkualitas tinggi dapat dilihat dari respon pengguna data statistik. Sebagai lembaga statistik nasional, BPS harus dapat menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Selama tahun 2018-2021, persentase konsumen data BPS di Sumatera Selatan yang merasa puas dengan kualitas data statistik sudah sangat baik mencapai hingga 99,31 persen di tahun 2021.

INDIKATOR 17.18.1.(B) PERSENTASE KONSUMEN YANG MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA

Gambar 17.3
Persentase Konsumen yang Menggunakan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai Rujukan, 2018-2021



Sumber : BPS, Survei Kebutuhan Data

Persentase konsumen di Sumatera Selatan yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama pada tahun 2018 adalah sebesar 92,13 persen. Selanjutnya persentase tersebut terus meningkat hingga mencapai 100 persen di tahun 2020, dan sedikit menurun menjadi 95,83 persen di tahun 2021. Hal tersebut meunjukkan bahwa konsumen data di Sumatera Selatan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penggunaan data statistik BPS.

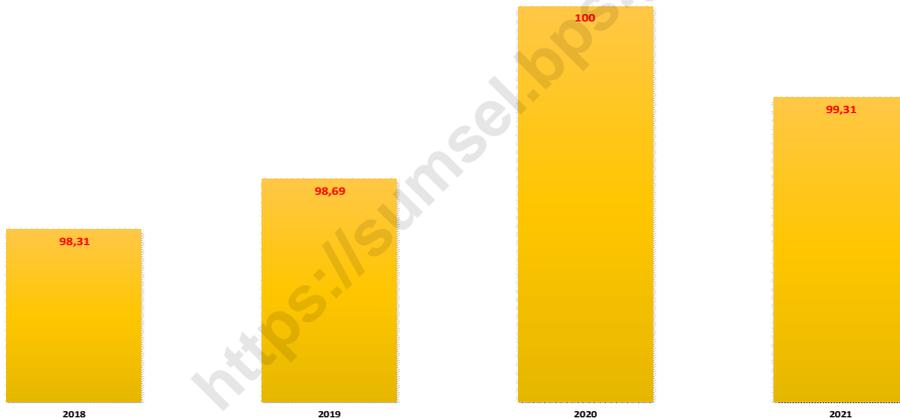


TARGET 17.19 PADA TAHUN 2030, MENGANDALKAN INISIATIF YANG SUDAH ADA, UNTUK MENGEMBANGKAN PENGUKURAN ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG MELENGKAPI PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN Mendukung pengembangan kapasitas statistik di Negara Berkembang

INDIKATOR 17.19.2.(D) PERSENTASE KONSUMEN YANG PUAS TERHADAP AKSES DATA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

Gambar 17.4

Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik, 2018-2021



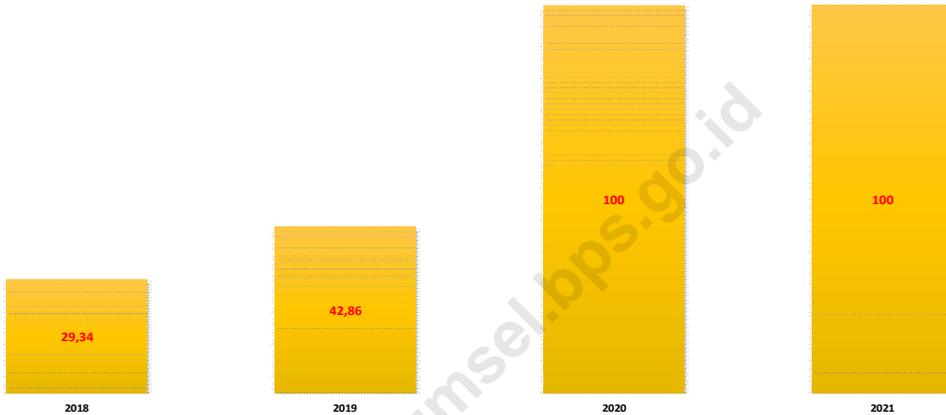
Sumber : BPS, Survei Kebutuhan Data

Selama tahun 2018-2021, persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018, sebanyak 98,31 persen konsumen mengaku puas terhadap akses data BPS dan angkanya terus meningkat sebanyak 100 persen di tahun 2020, dan sedikit menurun menjadi 99,31 persen di tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPS telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mempermudah akses data dan informasi statistik.



INDIKATOR 17.19.2.(E) PERSENTASE KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN DATA BPS DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL

Gambar 17.5
Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional, 2018-2021



Sumber : BPS, Survei Kebutuhan Data

Konsumen data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadikan data tersebut sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional telah mencapai 100 persen. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar 29,34 persen di tahun 2018, dan 42,86 persen di tahun 2019. Peningkatan angka tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kemampuan BPS sebagai lembaga statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan nasional.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Kapten Anwar Sastro No.1131 Palembang

Telepon: (0711) 353174, Fax: (0711) 353174

Email: bps1600@bps.go.id